

**Analisis Elastisitas dan Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga
Kerja Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Idah Nurjanah

Nomor Mahasiswa : 18313078

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

YOGYAKARTA

2022

**Analisis Elastisitas dan Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga
Kerja Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata-1
Program Studi Ekonomi Pembangunan
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Idah Nurjanah
Nomor Mahasiswa : 18313078
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

YOGYAKARTA

2022

Pernyataan Bebas Plagiarisme

Pernyataan Bebas Plagiarisme

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini, dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 9 Agustus 2022

Penulis



Idah Nurjanah

PENGESAHAN

**ANALISIS ELASTISITAS DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2020**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Idah Nurjanah

Nomor Mahasiswa : 18313078

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal: Senin, 8 Agustus 2022

Dosen Pembimbing

ACC Ujian skripsi, 8 Agustus 2022



(Indah Susantun, Dra., M.Si.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

Bismillahirrahmannirrahim

Pada Semester Genap 2022/2023, hari, tanggal Kamis, 15 September 2022 Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : **IDAH NURJANAH**
No. Mahasiswa : **18313078**
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS ELASTISITAS PENYERAPAN TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2020**
Pembimbing : **Indah Susantun, Dra., M.Si.**

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir/Skripsi tersebut dinyatakan:

1. **Lulus Ujian Tugas Akhir *)**
 - a. ~~Tugas Akhir tidak direvisi~~
 - b. Tugas Akhir perlu direvisi
2. **Tidak Lulus Ujian Tugas Akhir**

Nilai : **A**
Referensi : Layak/Tidak Layak *) ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji
Ketua Tim : **Priyonggo Suseno, S.E., M.Sc.**

Anggota Tim : **Indah Susantun, Dra., M.Si.**

Yogyakarta, 15 September 2022

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi



Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D.

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu
- Bagi yang lulus Ujian Tugas Akhir dan Komprehensif, segera konfirmasi ke Divisi Akademik

PENGESAHAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS ELASTISITAS PENYERAPAN TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2020

Disusun Oleh : IDAH NURJANAH

Nomor Mahasiswa : 18313078

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari, tanggal: Kamis, 15 September 2022

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Indah Susantun, Dra., M.Si.



Penguji : Priyonggo Suseno, S.E., M.Sc.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johari A. Satrio, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA.

PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Bapak dan Ibu tercinta (Dabro & Sari)

Kakak tercinta (Mugi Rabayu, Sumiyati, & Asep Anwar)

Keponakan tercinta (Alfareza, Alfarizi, Abror, Faris)

Teman berjuang sampai akhir (Suami- Kharis Fariqin)

Teman, sahabat, dan saudara tercinta

Bapak dan Ibu Dosen FE UII



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta karunia dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Elastisitas dan Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2020”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Untuk itu pula dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Dahro dan Ibu Sari yang telah memberikan fasilitas, doa, dukungan, dan semangat yang tak terhingga kepada penulis.
2. Kakak penulis, Mugi Rahayu, Sumiati, Asep Anwan yang selalu memberikan dukungan baik moril dan materil kepada penulis.
3. Ibu Dra. Indah Susantun., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih telah memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonometrika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq MA. selaku Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Rizky Melliana Devi, Azizah Dwi Martiani yang senantiasa memberikan waktu luang untuk berkeluh kesah yang tidak lupa juga memberi semangat.
9. Sahabat asrama, Diana, Zahro, Salsabila, Atika, Audi, Saqifah, Uly, Nafi yang telah memberikan semangat dan hiburan dalam penyelesaian skripsi.

10. Seluruh teman seperjuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Almira, Vania, TriYuli, Alifia, Mutia, Bahrul, Fausta, Rahayu, dan teman teman lainya yang telah banyak membantu dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Mas Kharis, teman bejuang sampai akhir.
12. Saya Sendiri Idah Nurjanah dengan semangat dan perjuangan dalam penyelesaian skripsi.



Yogyakarta, 1 Agustus 2022

Idah Nurjanah

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	iv
PENGESAHAN UJIAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	8
1.3.1 Tujuan.....	8
1.3.2 Manfaat.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2.....	11
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
2.1 Kajian Pustaka.....	11
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Teori Tenaga Kerja.....	15
2.2.2 Penyerapan Tenaga Kerja.....	16
2.2.3 Teori Permintaan Tenaga Kerja	17
2.2.4 Elastisitas penyerapan tenaga kerja	19
2.2.5 Produk Domestik Regional Bruto.....	21
2.2.6 Upah Minimum.....	22

2.2.7	Investasi.....	26
2.2.8	Pendapatan Asli Daerah	28
2.3	Hubungan Antar Variabel.....	30
2.4	Kerangka Pemikiran.....	33
2.5	Hipotesis Penelitian.....	33
BAB 3	35
METODE PENELITIAN		35
3.1	Jenis dan Cara Pengumpulan Data	35
3.2	Definisi Variabel Operasional	35
3.3	Metode Analisis	38
BAB 4	43
ANALISIS DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	43
4.2	Hasil Analisis dan Pembahasan.....	47
4.2.1	Pemilihan Model.....	47
4.2.2	Model Regresi Panel Fixed Effect.....	49
4.2.3	Pengujian Hipotesis.....	50
4.2.4	Analisis antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	52
4.2.5	Perhitungan Elastisitas	53
4.3	Pembahasan.....	53
BAB 5	58
SIMPULAN DAN IMPLIKASI.....		58
5.1	Simpulan	58
5.2	Implikasi.....	59
Daftar Pustaka		60
Lampiran		63

Daftar Tabel

Table 1 Statistik Deskriptif.....	43
Table 2 Perbedaan Intersep Antar Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta .	52
Table 3 Perbedaan Elastisitas Variabel.....	53



Daftar Gambar

Gambar 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Pulau Jawa Tahun 2014-2020	2
Gambar 2 Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020 3	
Gambar 3 Laju PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020	4
Gambar 4 PAD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020	5
Gambar 5 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020	6
Gambar 6 Kondisi Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020.....	7
Gambar 7 Penggunaan Tenaga Kerja Jangka Panjang dan Jangka Pendek	18
Gambar 8 Grafik Statistik Deskriptif Tenaga Kerja	44
Gambar 9 Grafik Statistik Deskriptif PDRB	44
Gambar 10 Grafik Statistik Deskriptif Investasi	45
Gambar 11 Grafik Statistik Deskriptif UMK.....	46
Gambar 12 Grafik Statistik Deskriptif PAD	46

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Statistik Deskriptif.....	63
Lampiran 2 Common Effect Models.....	64
Lampiran 3 Fixed Effect Models.....	64
Lampiran 4 Random Effect Models.....	65
Lampiran 5 Uji Chow.....	66
Lampiran 6 Uji Hausman.....	66
Lampiran 7 Perhitungan Elastisitas.....	68



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengetahui faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2020. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini diantaranya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), Investasi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan software Eviews 9. Data panel yaitu gabungan antara data *time series* berupa urutan waktu yang digunakan yaitu tahun 2014-2020 dan data *cross section* yaitu berupa 5 Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total jumlah observasi yaitu 35 observasi. Adapun model yang paling tepat dalam penggunaan data panel adalah *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan inelastis kemudian Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh negatif dan inelastis terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020. Sedangkan variabel Investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh dan bersifat inelastis terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020.

Kata kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), Investasi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB 1

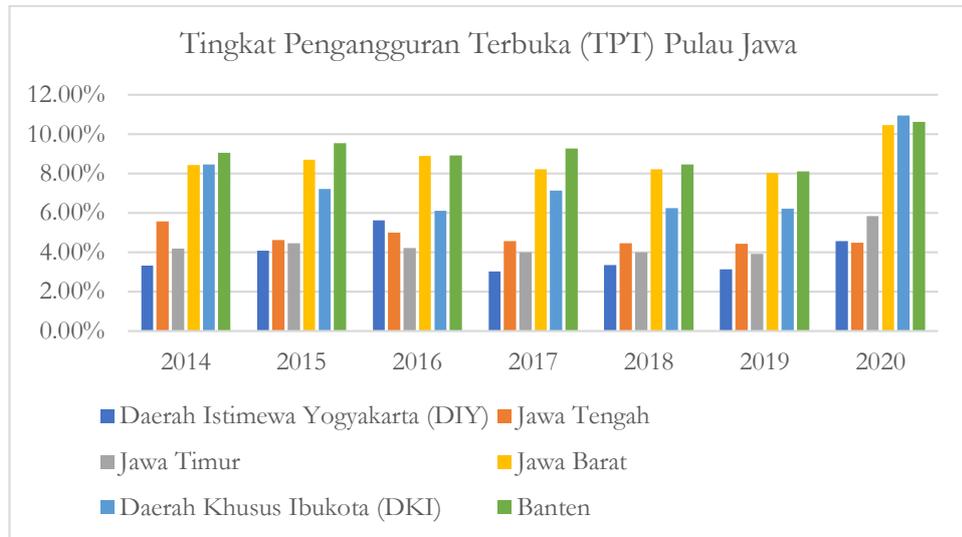
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara menjadi indikasi dalam keberhasilan pembangunan ekonomi dimana salah satu faktor krusial pada pembangunan ekonomi ialah penyerapan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi merupakan berbagai macam proses yang mengimplikasikan dalam perubahan struktur ekonomi serta perubahan social seperti disparitas, pengentasan kemiskinan dan pengangguran (Todaro & Smith, 2015). Konflik utama di beberapa negara berkembang seperti Indonesia adalah pengangguran. Beberapa factor yang menjadi penyebab kenaikan angka pengangguran ialah tingginya laju pertumbuhan penduduk disertai minimnya lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh beberapa factor diantaranya kurangnya modal untuk berinvestasi serta kebijakan upah minimum.

Kesejahteraan suatu daerah dapat terlihat dari perluasan lapangan kerja, dimana akan menyerap tenaga kerja yang mengindikasikan majunya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi memang tidak secara langsung berdampak pada taraf hidup masyarakat namun dapat berjalan melalui berbagai arah antara lain adalah ketenagakerjaan. Apabila pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah membaik, maka angka pengangguran pada daerah tersebut akan menurun. Dengan kata lain tingginya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan tingginya serapan tenaga kerja.

Gambar 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Pulau Jawa Tahun 2014-2020



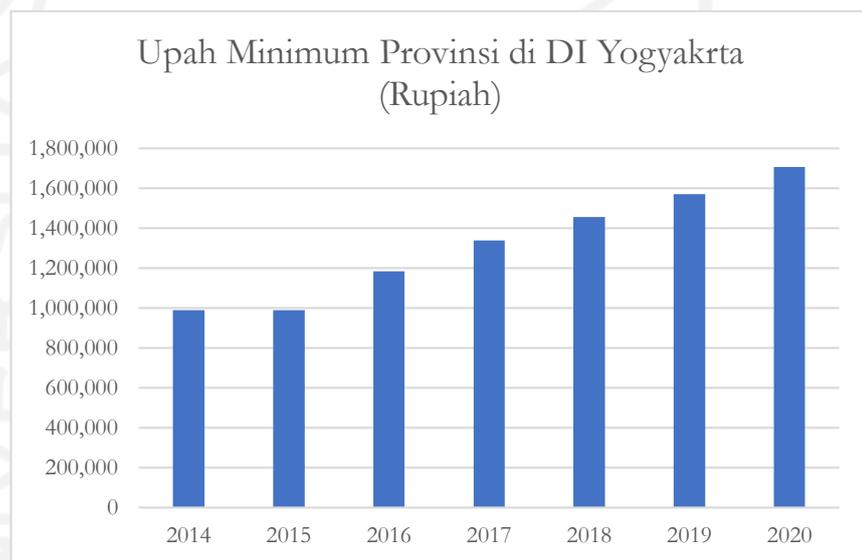
Sumber Badan Pusat Statistik

Dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dapat terlihat bahwa dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa berjalan fluktuatif. Namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung lebih rendah dibanding dengan provinsi lain di Pulau Jawa, dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi dibanding dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tujuh tahun terakhir juga berjalan secara fluktuatif, namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah Istimewa Yogyakarta paling tinggi adalah pada tahun 2016 sebesar 5,16%. Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 3,02% dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 menjadi sebesar 3,35%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 3,02% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 4,57%.

Beberapa factor penting yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja disuatu daerah adalah PDRB, Upah Minimum, Investasi yaitu investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri serta Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya investasi, dampak utama yang terjadi adalah meningkatkan kesempatan

kerja yang mengakibatkan pendapatan masyarakat bertambah. Perkembangan Investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2015 sampai 2019 menunjukkan pertumbuhan yang positif baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Namun pada tahun 2020 realisasi investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah RP 1,5T melambat sebesar 28,30% dibandingkan dengan tahun 2019 dengan capaian RP 2,1T (Dpmp1, 2020).

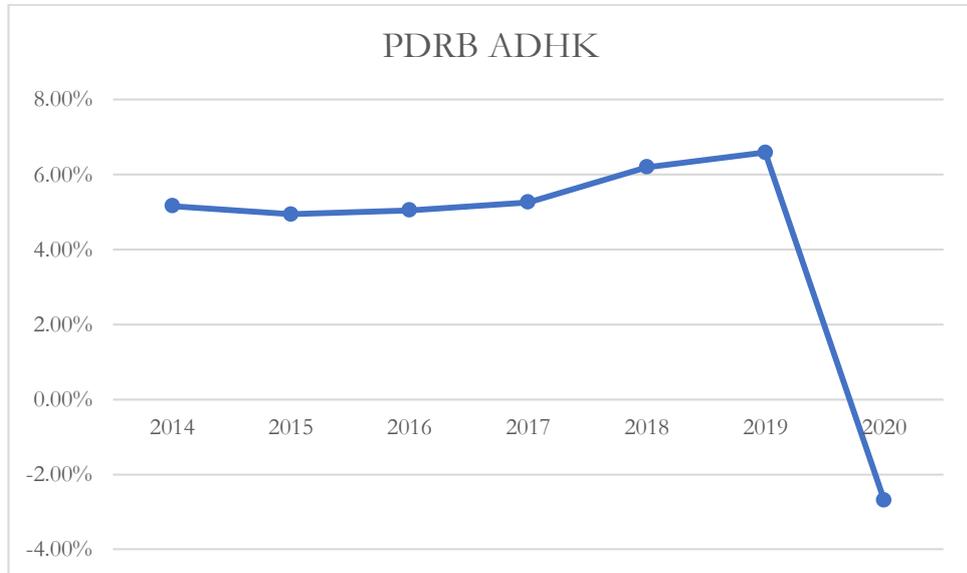
Gambar 2 Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020



Sumber Badan Pusat Statistik

Factor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah upah minimum. Dalam teorinya, kenaikan upah minimum akan menurunkan permintaan tenaga kerja yang mengakibatkan turunya serapan tenaga kerja. Berdasarkan data yang di publikasikan BPS dalam gambar 2, Upah Minimum Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 dan 2015 Upah Minimum DIY sebesar Rp 988.500,00 kemudian naik menjadi Rp 1.182.510,00 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar Rp 1.337.645,00. Kemudian pada tahun 2018 hingga tahun 2020 selalu mengalami peningkatan hingga sebesar Rp 1.704.608,00

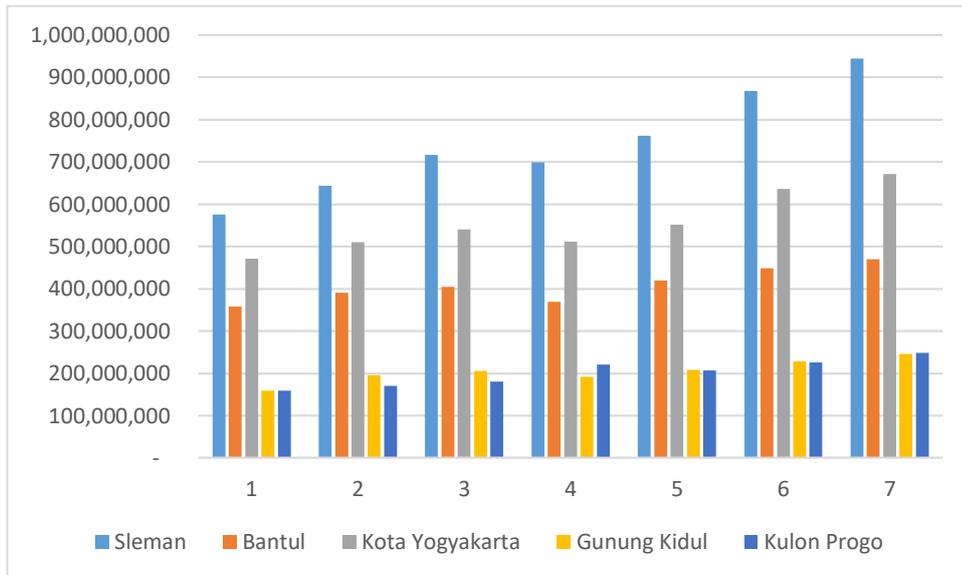
Gambar 3 Laju PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020



Sumber Badan Pusat Statistik

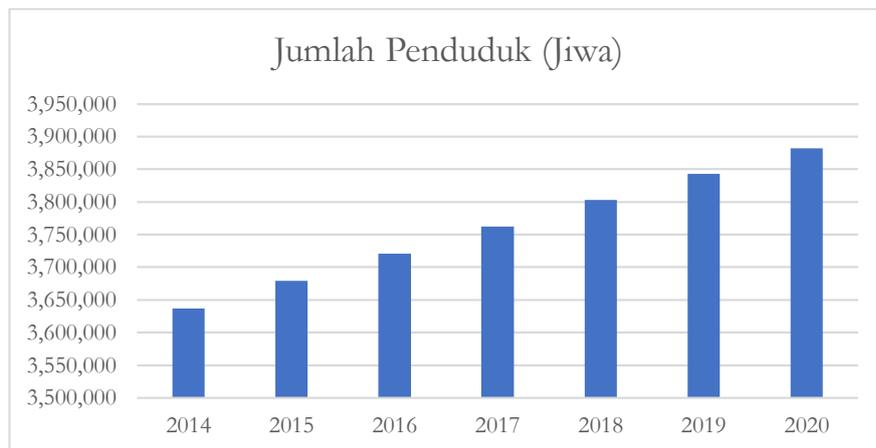
Serapan tenaga kerja memiliki hubungan yang sangat erat terhadap PDRB dimana tenaga kerja menjadi salah satu fungsi dalam produksi. Laju PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 laju PDRB sebesar 5.16%, mengalami penurunan menjadi sebesar 4.94% pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar 6.59%. Sementara pada tahun 2020, laju PDRB mengalami penurunan yang cukup drastic sehingga menjadi -2.69%.

Gambar 4 PAD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020



Gambar 4 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota dalam 7 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Kenaikan yang cukup tinggi berada di tahun 2020 (7) hal ini dialami oleh semua Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diatas menunjukkan bahwa kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sumbangsih besar terhadap alokasi pembangunan yang ada di Provinsi Daearah Istimewa Yogyakarta.

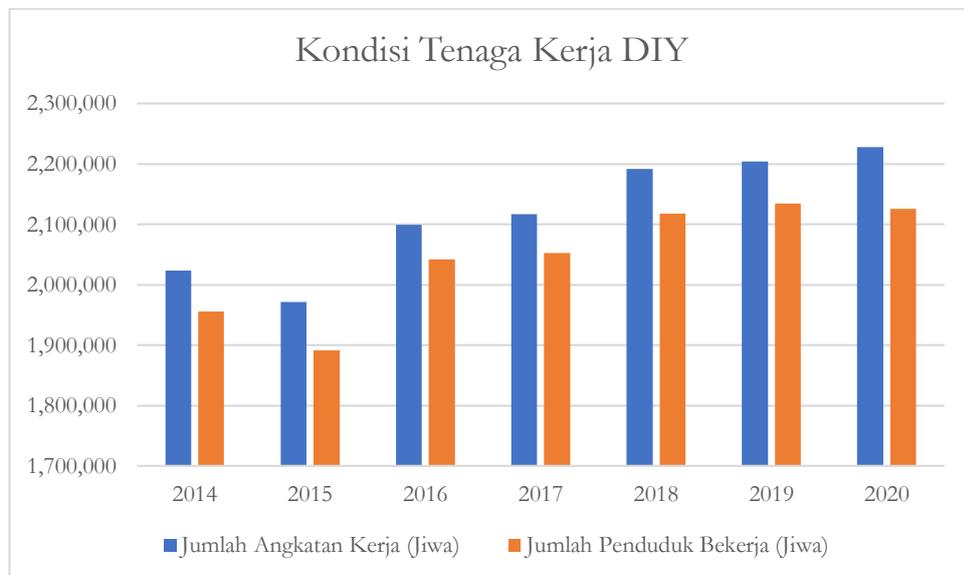
Gambar 5 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020



Sumber Badan Pusat Statistik

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik DIY terjadi jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar 3.637.116, kemudian pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 3.679.176 jiwa. Pada tahun 2016 jumlah penduduk sebesar 3.762.167 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebesar 3.762.167 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 3.882.228 jiwa. Pertumbuhan penduduk ini akan menyebabkan jumlah angkatan kerja juga meningkat. Dengan itu, maka pertumbuhan penduduk harus disertai dengan perluasan lapangan kerja sehingga tidak menimbulkan pengangguran.

Gambar 6 Kondisi Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020



Sumber Badan Pusat Statistik

Penduduk angkatan kerja adalah penduduk pada usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang bekerja, atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara menganggur (BPS, 2019). Terlihat pada Gambar 5, jumlah penduduk bekerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah penduduk bekerja berjalan secara labil pada tahun 2014 jumlah penduduk bekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 1.956.043 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar 1.891.218 jiwa. Kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2016 menjadi sebesar 2.042.400 jiwa dn terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 2.126.316 jiwa.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dan tingkat elastisitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh dan tingkat elastisitas Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana Pengaruh dan tingkat elastisitas Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana Pengaruh dan tingkat elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakan diatas, tujuan yang ingin dicapai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan tingkat elastisitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan tingkat elastisitas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan tingkat elastisitas Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan tingkat elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.3.2 Manfaat

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar penulis dapat mengetahui berbagai macam variabel yang dapat mempengaruhi penerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain daripada itu, dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai visi dalam mendapatkan Gelar Sarjana serta menjadi tambahan bagi pengalaman penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

2. Bagi Instansi Terkait

Bagi instansi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan kebijakan yang tepat terkait ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian serta Manfaat Penelitian.

Bab II. Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Dalam bab ini akan dibahas Kajian Pustaka, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, Hubungan antar Variabel serta Hipotesis Penelitian.

Bab III. Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas Jenis dan Sumber Data, Definisi Operasional Variabel dan Metode Analisis Data.

Bab IV. Hasil Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Analisis Statistik Deskriptif, Hasil Analisis dan Pembahasan.

Bab V. Penutup

Bab ini membahas Kesimpulan dan Implikasi.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian Rosalina, (2013) yang bertujuan untuk menganalisis kondisi penyerapan tenaga kerja di Indonesia, dan Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis regresi panel data pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2008 hingga 2011 dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian Variabel investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel Upah berpengaruh secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian Damayanti, (2019) yang bertujuan untuk mengetahui pentingnya pengaruh PDRB, UMK, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota DIY tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi panel data pada seluruh Kabupaten di DIY dengan periode 2012 sampai 2016. Hasil dari penelitian ini adalah variabel PDRB dan variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian variabel UMK mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dikarenakan upah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan upah minimum Kabupaten/Kota dimana pergerakan UMK relatif stabil dan ditentukan oleh kesepakatan antara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. Variabel investasi juga mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian Anindita, (2016) yang bertujuan untuk menganalisis serapan tenaga kerja di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan analisis model panel dinamis, metode analisis Generalized Method of Moments (GMM), yaitu data dari setiap kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta berupa data jumlah tenaga kerja, IPM, PDRB per kapita,

investasi dan UMP dari tahun 2008 hingga 2013. Penelitian ini menemukan bahwa variabel IPM memiliki pengaruh positif terhadap ketenagakerjaan. Selanjutnya variabel PDRB per kapita memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel UMP dan variabel Investasi memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan energi.

Penelitian Julfira, (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari investasi, PDRB riil dan upah minimum kabupaten/kota terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019. Data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah data panel di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2015 hingga 2019. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa variable Investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Kemudian variable PDRB Riil dan variabel UMK secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap serapan tenaga kerja.

Penelitian Bella, (2018) bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah tahun 2010-2016. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai 2016. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa variabel IPM dan variabel angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, variabel upah minimum dan inflasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian Feriyanto & Sriyana, (2016) yang bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari 33 provinsi untuk periode 2006 hingga 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable Upah Minimum berhubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan investasi domestic dan asing berpengaruh positif terhadap tingkat pekerjaan. Namun dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi tingkat local belum

mengurangi jumlah orang miskin. Kemudian kebijakan upah minimum dalam penelitian ini menjadi jebakan pengangguran pada periode tersebut.

Penelitian Kurniasih (2017) yang bertujuan untuk menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan ekonomi di provinsi-provinsi Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel pada 33 provinsi di Indonesia, dan tidak termasuk provinsi Kalimantan Utara mengingat provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan sensus dengan data time series dari tahun 2006 (mengingat ada provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2004, yaitu Sulawesi Barat) hingga 2010 (lima tahun) dikombinasikan dengan data penampang yang terdiri dari 33 provinsi, sehingga menjadi panel data dari 165 pengamatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketidaksetaraan pendapatan, tetapi berpengaruh negative terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap ketidaksetaraan pendapatan tetapi berpengaruh negative terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pendapatan juga berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi ini tidak optimal dalam hal penyerapan tenaga kerja dan tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi ini juga menemukan bahwa tidak ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

Penelitian Biamrillah & Nurhayati, (2018) bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, inflasi, produk domestik regional bruto (PDRB) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah karesidenan Semarang. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dari data jumlah penduduk, inflasi, PDRB dan UMK daerah karesidenan Semarang pada periode 2007 sampai 2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian variabel Inflasi memiliki pengaruh

terhadap penyerapan tenaga kerja. Variable UMK juga tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian Pangastuti, (2015) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, Upah minimum Kabupaten/ Kota (UMK), Pengangguran, Serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penyerapan tenaga di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012. Analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan metode random effect (REM). Penelitian ini menemukan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian variabel upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel pengangguran berpengaruh positif, artinya ketika pengangguran meningkat maka penyerapan tenaga kerja meningkat. Variabel PAD berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Merujuk pada penelitian yang sudah dilakukan, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020” Pada penelitian ini penulis mengacu kepada penelitian Anindita, (2016). Penelitian tersebut menganalisis pengaruh IPM, PDRB, UMK, Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota DIY tahun 2008-2013 dengan menggunakan alat analisis regresi panel data pada seluruh Kabupaten di DIY periode 2008-2013. Penelitian penulis juga mengacu kepada penelitian Pangastuti, (2015) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, Upah minimum Kabupaten/ Kota (UMK), Pengangguran, Serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penyerapan tenaga di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012. Pengujian pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan metode random effect. Sedangkan pada penelitian penulis menganalisis tentang pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), Investasi, serta Pendapatan Asli Daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2020. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu Regresi Data Panel.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Tenaga Kerja

Menurut Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, (2003) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah seseorang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dumairy, (1996) mendefinisikan tenaga kerja adalah penduduk yang memiliki umur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja di suatu negara berbeda-beda. Di Indonesia batas usia minimum kerja adalah 10 tahun tanpa batas maksimum, hal ini menandakan bahwa mereka yang sudah berumur 10 tahun termasuk dalam golongan Angkatan kerja. Merujuk pada pendapat diatas maka, seseorang yang memiliki pekerjaan maupun tidak bekerja, selama seseorang tersebut masih dalam rentang usia kerja maka tetap dikatakan sebagai tenaga kerja.

Simanjuntak, (2005) menyatakan bahwa batasan umur minimal usia kerja di Indonesia yaitu 15 tahun tanpa batasan umur maksimal. Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 1999 mengenai Ratifikasi Konvensi ILO No.138 Tahun 1973 tentang Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja, menyatakan bahwa usia minimum yang diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di Indonesia adalah 15 tahun. Ini berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk yang berumur muda yang sudah bekerja dan mencari pekerjaan (Simanjuntak, 2001).

Dalam istilah ketenagakerjaan, terdapat dua bagian yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik, angkatan kerja meliputi penduduk usia kerja yang sedang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi untuk beberapa waktu tidak bekerja dikarenakan suatu hal, seperti pekerja yang sedang cuti dan petani yang sedang menunggu panen. Kemudian seseorang yang sedang mencari, berusaha, dan mengharapkan pekerjaan. Di

sisi lain, mereka yang bersekolah dan mengurus rumah tangga tidak bekerja adalah termasuk dalam bukan angkatan kerja. Bekerja adalah seorang pekerja yang bekerja dengan tujuan memperoleh keuntungan dan yang jam kerjanya telah satu jam atau lebih selama satu minggu berturut-turut. (Feriyanto, 2014).

2.2.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Todaro & Smith, (2003) penyerapan tenaga kerja merupakan kondisi dimana tenaga kerja dapat diterima untuk bekerja, atau kondisi yang menggambarkan adanya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk diisi oleh para pencari kerja. Secara umum, kesempatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang diserap perusahaan untuk menghasilkan produknya. Daya serap tenaga kerja berbeda antara satu sektor dengan sektor lainnya (Sumarsono, 2003).

Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar daripada pertumbuhan kesempatan kerja merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang semakin meningkat dan membaik akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja disuatu daerah. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan yaitu faktor permintaan (dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi) dan faktor penawaran (di tentukan oleh perusahaan struktur penduduk).

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah lapangan pekerjaan yang dapat terisi, tercermin dalam jumlah penduduk yang dipekerjakan. Orang-orang yang bekerja diserap dan tersebar di berbagai sektor ekonomi. Penyerapan penduduk yang bekerja didorong oleh permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat disebut juga permintaan tenaga kerja (Kuncoro, 2002). Di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar berarti memiliki sumber daya yang besar pula, oleh karena itu sumber daya manusia yang ada harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Semua kegiatan dan sektor ekonomi harus mampu menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja erat kaitanya dengan keseimbangan interaksi antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja dimana permintaan pasar tenaga kerja dan

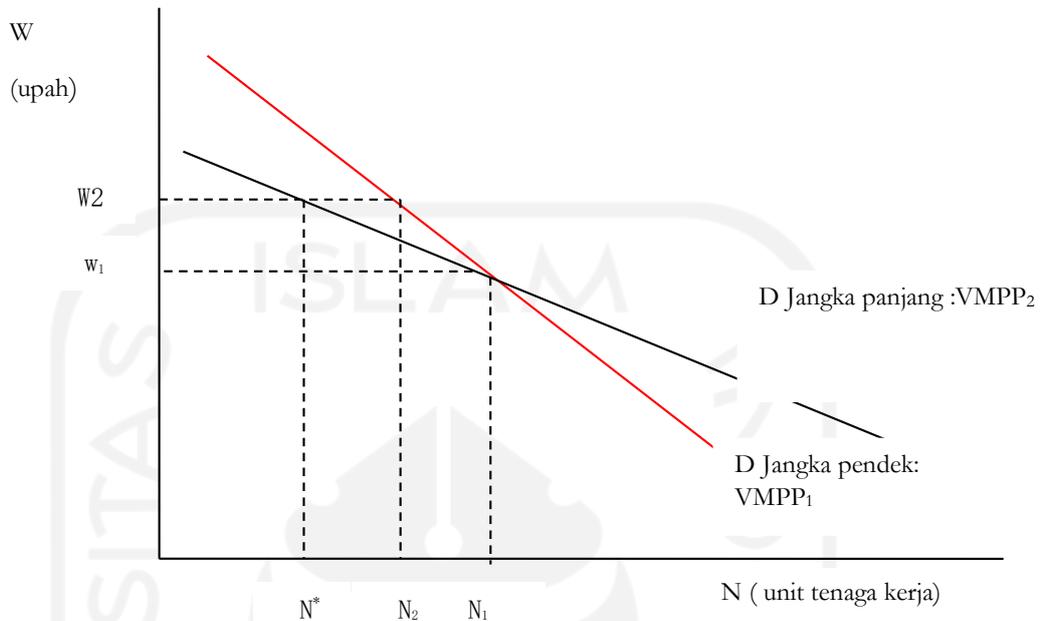
penwaran pasar tenaga kerja secara bersamaan menentukan penggunaan tenaga kerja keseimbangan (Fuad, 2013).

2.2.3 Teori Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.

Permintaan perusahaan akan tenaga kerja berbeda dengan permintaan konsumen akan barang dan jasa. Input tenaga kerja dirancang untuk mendukung proses produksi yang menghasilkan produk yang dibeli dan dijual kepada konsumen. Konsumen akan membeli atau menggunakan jasa apabila konsumen tersebut mendapat manfaatnya. Dengan kata lain, pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Oleh karena itu, permintaan akan tenaga kerja merupakan permintaan turunan. Perilaku perusahaan yang mempekerjakan pekerja berubah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, input modal dianggap tetap, sedangkan tenaga kerja bersifat variabel. Dalam jangka panjang, modal dan tenaga kerja berfluktuasi dari waktu ke waktu karena perusahaan cenderung menggantinya dengan input yang relatif murah. (Feriyanto, 2014)

Gambar 7 Penggunaan Tenaga Kerja Jangka Panjang dan Jangka Pendek



Kurva jangka pendek menunjukkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan output dengan menambahkan lebih banyak modal, menambahkan lebih banyak tenaga kerja, atau menambahkan dua faktor produksi. tetapi, asumsi jangka pendeknya adalah modal konstan, sehingga tenaga kerja dapat ditingkatkan untuk meningkatkan produksi. Output ekstra yang diperoleh dengan menambahkan satu unit tenaga kerja disebut *marginal physical product of labor*. *Marginal physical product* yang semakin berkurang menggambarkan *diminishing return* dari setiap proses produksi dalam jangka pendek. Implikasi dari situasi ini adalah bahwa setelah jangka waktu tertentu, perusahaan hanya akan bersedia menambah tenaga kerja jika pekerja tambahan tersebut dibayar dengan upah yang lebih rendah daripada tenaga kerja sebelumnya. Setiap unit tenaga kerja tambahan menghasilkan produksi tambahan yang lebih sedikit, tergantung pada jumlah tenaga kerja yang digunakan. Oleh karena itu, kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek akan selalu menunjukkan kemiringan negatif.

Dalam jangka panjang, pengetahuan perusahaan mengenai harga input yang relatif murah akan mempengaruhi reaksi perusahaan dalam menghadapi

perubahan tingkat upah. Awalnya, perusahaan berada pada tingkat upah yang berlaku dalam jangka pendek dan beban kerja yang wajar. Asumsinya adalah bahwa kedua perusahaan berada dalam ekuilibrium jangka panjang, menggunakan kombinasi tenaga kerja dan modal termurah untuk menghasilkan output mereka. Jika suatu hari tingkat upah naik, perusahaan akan meningkatkan biaya tenaga kerja, kemudian perusahaan cenderung mengurangi daya guna tenaga kerjanya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, perusahaan menyesuaikan dengan mengganti modal dengan tenaga kerja sehingga hanya N pekerjanya yang dipekerjakan dalam jangka panjang.

Dari kurva di atas, dapat ditarik kesimpulan. Pertama, permintaan tenaga kerja lebih sensitif terhadap perubahan tingkat upah dalam jangka panjang (permintaan tenaga kerja lebih tinggi daripada dalam jangka pendek) karena perusahaan lebih fleksibel dalam jangka panjang. Hal ini diilustrasikan oleh kurva permintaan jangka panjang, yang lebih datar daripada kurva permintaan jangka pendek. Kedua, perusahaan dalam ekuilibrium jangka panjang juga harus berada dalam ekuilibrium jangka pendek.

2.2.4 Elastisitas penyerapan tenaga kerja

Elastisitas permintaan tenaga kerja adalah respon yang terjadi pada permintaan tenaga kerja sebagai akibat dari perubahan variabel independen yang mempengaruhinya. Menurut Feriyanto, (2014), Tingkat sensitivitas permintaan tenaga kerja dapat dibaca dari angka elastisitasnya. Elastisitas permintaan tenaga kerja adalah angka yang mewakili persentase perubahan permintaan relatif terhadap jumlah pekerja setelah 1% perubahan variabel independen yang mempengaruhinya.

Simanjuntak, (1985) menyatakan bahwa Konsep elastisitas dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan tenaga kerja dari waktu ke waktu, baik untuk setiap sektor maupun untuk perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya, dapat digunakan untuk mensimulasikan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan. Hal ini berarti memilih beberapa alternatif tingkat pertumbuhan untuk setiap sektor dan menghitung peluang kerja yang bisa

diciptakan. Selain itu, kebijakan pembangunan dipilih yang paling sesuai dengan situasi pasar tenaga kerja.

Secara makro, elastisitas kesempatan kerja digunakan untuk memperkirakan laju pertumbuhan produksi yang diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja yang ada. Begitu pula sebaliknya berapa besar angkatan kerja yang di perlukan untuk mengimbangi laju kenaikan produksi yang ada.

Menurut Feriyanto, (2014), beberapa variabel independen yang dapat memengaruhi permintaan tenaga kerja diantaranya adalah:

a. Upah Tenaga Kerja

Upah merupakan pendapatan yang diterima oleh seorang pekerja yang telah mengerahkan jasanya kepada perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu pengeluaran yang timbul dari pembayaran faktor-faktor produksi. Jika upah yang ditawarkan perusahaan tinggi maka yang terjadi adalah permintaan tenaga kerja akan menurun. Oleh karena itu, hubungan antara upah tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja adalah negatif.

b. Penjualan Produk

Dalam suatu perusahaan, apabila permintaan suatu produk tinggi maka itu menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk menyerap tenaga kerja guna memenuhi permintaan produk tersebut. Permintaan akan banyak produk dapat dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan rata-rata suatu negara atau wilayah.

c. Tingkat Bunga

Kaitanya terhadap laba atas penanaman modal, suku bunga rendah mendorong ekspansi bisnis dan investasi lainnya. Hal ini akan memaksa perusahaan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja dan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Sebaliknya jika terjadi inflasi dan menyebabkan tingkat bunga nominal naik maka akan menyebabkan tingkat bunga nominal pinjaman naik. Hal ini akan mengurangi minat perusahaan untuk meminjamkan ke bank untuk investasi, yang akan berdampak negatif bagi

perusahaan yaitu pengurangan volume produksi, sehingga permintaan tenaga kerja akan menurun.

2.2.5 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestic Regional Bruto merupakan jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. PDRB dibagi menjadi dua bagian, yakni PDRB Riil dan PDRB Nominal. PDRB Nominal atau disebut juga PDRB berdasarkan harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga tahunan, sedangkan PDRB Riil atau yang disebut juga PDRB berdasarkan harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku untuk periode waktu tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan struktur ekonomi, sedangkan perhitungan berdasarkan harga konstan, digunakan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi aktual dari tahun ke tahun dimana tidak termasuk faktor perubahan harga.

Produk Domestic Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonomi dalam keadaan tinggi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan yang berhasil merupakan cerminan dari kemampuan suatu daerah untuk memobilisasi semua sumber daya yang ada. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami kemajuan, maka akan menjadi peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan produksinya, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi peningkatan pemanfaatan tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Kontributor utama penciptaan lapangan kerja adalah pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2002).

Produk Domesti Regional Bruto dapat diperhitungkan dengan beberapa pendekatan yakni:

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi ini dapat dihitung dengan menggunakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan melalui kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan ini adalah dengan menghitung nilai tambah pendapatan yang berasal dari faktor produksi seperti upah, bunga, sewa dan laba.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran ini adalah dengan menghitung jumlah dari faktor produksi seperti upah, sewa tanah, bunga modal dan laba yang diterima tetapi tidak termasuk pajak penghasilan dan pendapatan yang lain. Pendekatan pengeluaran harus dihitung dengan menggunakan nilai barang dan jasa yang digunakan oleh rumah tangga dan pemerintah untuk keperluan konsumsi berupa investasi dan ekspor neto dikurangi nilai impor.

2.2.6 Upah Minimum

Menurut Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, (2003) Pasal 1 ayat 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja untuk diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja, yang ditentukan dan dibayar sesuai dengan kesepakatan, konvensi, atau undang-undang dan peraturan perundingan bersama, tunjangan untuk pekerjaan atau jasa yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atau kompensasi atas penggunaan faktor-faktor produksi dalam bentuk tenaga kerja. Upah minimum atau upah yang dianggap paling tepat ini adalah upah yang bisa memenuhi kebutuhan dasar para pekerja. Upah minimum dibuat dengan tujuan melindungi para pekerja dari upah rendah.

Upah merupakan sebuah polemik. Sebuah alasan bagi sebagian orang yang mendukung kebijakan upah minimum adalah bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monopsoni dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang mempunyai keterbatasan keterampilan. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional (Kusnaini D, 1998).

Sementara alasan bagi sebagian orang yang menentang kebijakan upah minimum adalah bahwa penetapan upah minimum akan mengakibatkan naiknya pengangguran dan juga memungkinkan kecurangan dalam pelaksanaan seperti upah minimum hanya diterima oleh para remaja yang hanya bekerja paruh waktu sebagai tambahan yang selanjutnya berpengaruh pada penurunan tingkat upah dalam suatu sektor yang tidak terjangkau kebijakan upah minimum.

Upah minimum adalah upah terendah yang digunakan oleh pengusaha sebagai tolak ukur untuk menentukan upah sebenarnya dari pekerja atau pekerja yang bekerja di suatu perusahaan. Dengan demikian, Upah Minimum Kabupaten (UMK) dikenal sebagai upah minimum yang ditetapkan di Kota/Kabupaten berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur. Balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh pengusaha kepada seorang pekerjanya disebut sebagai upah (Sumarsono, 2003).

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (1999) Nomor: Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum, gaji bulanan terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan bulanan yang tidak disesuaikan dengan kehadiran dan kinerja pekerjanya disebut tunjangan tetap. Upah minimum dapat dibedakan menjadi upah minimum regional dan upah minimum sektoral:

- a. Upah Minimum Regional adalah upah pokok serta tunjangan bagi pekerja tingkat terendah dengan waktu bekerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu.
- b. Upah Minimum Sektoral Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku pada suatu provinsi sesuai kemampuan sektor tersebut.

Penetapan Upah Minimum

Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota memberikan usulan kepada pejabat daerah dengan pertimbangannya terhadap beberapa variabel seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, biaya hidup dan kondisi pasar tenaga kerja yang dipertimbangkan kembali oleh Kepala Daerah baik oleh Gubernur maupun Bupati/ sebagai upaya dalam penetapan upah minimum (Feriyanto, 2014).

Pemerintah telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk memastikan pelaksanaan mekanisme penetapan upah minimum yang tepat terutama dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia KEP-226/MEN/2000. Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di revisi oleh Pemerintah dalam jangka waktu satu tahun sekali. Selain daripada Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota, terdapat juga Upah Minimum Sektor Provinsi (UMS Provinsi) dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota). Upah Minimum Sektoral (UMS Kabupaten/Kota) merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan kesepakatan serikat pekerja/serikat buruh. Dalam praktiknya, upah minimum yang berlaku hanyalah salah satu dari empat jenis upah. Semua pelaku usaha atau industri wajib membayar pekerjanya sesuai dengan batas upah minimum yang telah ditetapkan. Namun, jika perusahaan tidak dapat melakukannya, perusahaan dapat mengajukan penangguhan berdasarkan Undang-Undang Permenaker No. KEP-231/MEN/2003.

Dalam penetapan upah minimum, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan Permenaker No.17 Tahun 2005 dan Permenaker No. 13 Tahun 2012, yaitu:

- a. Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL merupakan standar kebutuhan bagi seorang pekerja agar bisa hidup secara layak dalam jangka waktu 1 bulan. Dalam menetapkan nilai KHL, pemerintah melakukan peninjauan melalui data dan informasi yang diperoleh dari lembaga yang memiliki wewenang seperti BPS. Pengkajian KHL dilakukan setiap lima tahun sekali dan dilakukan oleh Dewan Pengupahan.
- b. Produktivitas Makro. Upah minimum dapat dikatakan tercapai jika upah tersebut seimbang dengan pendapatan per kapita di daerah tersebut.
- c. Pertumbuhan Ekonomi. Apabila suatu wilayah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka aktivitas ekonomi di wilayah tersebut juga tinggi. Aktivitas ekonomi yang tinggi akan menyebabkan permintaan akan uang meningkat. Tingginya permintaan uang di suatu wilayah akan mengakibatkan inflasi di wilayah tersebut, sehingga dalam menetapkan upah minimum harus mempertimbangkan kemungkinan inflasi agar daya beli pekerja tidak menurun, yakni dengan cara menaikkan upah nominal.
- d. Kondisi Pasar Kerja. Saat menetapkan upah minimum, pemerintah juga memperhitungkan jumlah pekerjaan yang tersedia, sehingga tindakan terkait upah minimum tidak membatasi permintaan tenaga kerja dan meningkatkan pengangguran. Melihat kondisi pasar tenaga kerja saat ini yang didominasi oleh penawaran tenaga kerja, jika pemerintah terus menaikkan upah minimum, kemungkinan besar permintaan tenaga kerja akan menurun jika upah merupakan bagian dari biaya produksi.
- e. Kondisi Usaha Marjinal. Perusahaan marjinal, yaitu perusahaan yang tidak dapat membayar upah kepada karyawannya. Dalam menetapkan upah minimum, pemerintah mempertimbangkan perusahaan-perusahaan marjinal dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak menderita kerugian karena ketidakmampuan mereka untuk

memenuhi upah minimum yang berlaku. Ketika bisnis pinggiran mengalami kerugian, itu juga mempengaruhi tenaga kerja yang bekerja di bisnis itu, sehingga menciptakan masalah baru.

2.2.7 Investasi

Menurut UU No. 25/2007, investasi mengacu pada berbagai bentuk kegiatan penanaman modal dalam dan luar negeri yang digunakan guna menyelenggarakan usaha di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran usaha yang bisa menciptakan kesempatan bagi pelaku kegiatan ekonomi untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas serta meningkatkan cara produksi operasional untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga terjadi peningkatan output yang dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat. Menurut Sukirno, (2015) investasi diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal dengan tujuan untuk membeli alat-alat produksi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dalam teori ekonomi, investasi adalah kegiatan pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah output dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi pertambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti pertambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, lahan baru dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan produksi, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Menurut Mankiw, (2003), dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat salah satunya adalah dengan investasi. Pemerintah, swasta serta kerjasama antara pemerintah dan swasta dapat melakukan kegiatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Merujuk pada pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya dengan melakukan kegiatan investasi maka dapat menghasilkan barang dan jasa dengan asumsi bahwa apabila investasi meningkat, maka skala produksi dan perdagangan meningkat, sehingga hal tersebut akan memperluas kesempatan kerja, kemudian dapat meningkatkan pendapatan perkapita yang pada akhirnya

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal yang dihasilkan dari kegiatan investasi pada umumnya dapat digunakan untuk menggantikan barang modal yang telah kadaluwarsa dan dapat diperbaharui.

Beberapa teori terkait investasi adalah sebagai berikut:

a. Teori Harrod Dommar.

Harrod Dommar berpendapat bahwa pembentukan modal atau kegiatan investasi diperlukan untuk mencapai ekonomi yang kuat. Pembentukan modal dipandang sebagai biaya yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa untuk menciptakan permintaan yang berguna bagi masyarakat. Ketika sejumlah besar modal terakumulasi dalam satu periode, perekonomian memiliki kapasitas untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa pada periode berikutnya (Sukirno, 2009).

b. Teori Neo Klasik.

Tokoh Neo Klasik, yakni Sollow dan Swan memiliki fokus terhadap interaksi antara pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, kemajuan teknologi dan output selama pertumbuhan ekonomi. Menurut teori klasik, persediaan modal rata-rata per angkatan kerja akan semakin cepat tumbuh dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Jika rasio modal masing-masing pekerja semakin tinggi, maka produktivitas setiap pekerja akan semakin tinggi pula (Arsyad, 2010).

Adapun Investasi dibagi menjadi dua macam, diantaranya adalah:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia., (2007), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Pasal 1 menyatakan bahwa kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri yaitu warga negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia,

Negara Republik Indonesia atau wilayah Indonesia menanam modal di wilayah Republik Indonesia. Investasi ini bertujuan untuk mendukung kemajuan perekonomian domestik.

2. Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 menyebutkan bahwa Penanaman modal asing termasuk penawaran modal asing langsung yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dan penggunaannya perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri. Dengan kata lain bahwa resiko dari penanaman modal adalah sepenuhnya di tanggung oleh pemilik modal.

2.2.8 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan jumlah dari seluruh penerimaan yang diperoleh daerah dari semua sumber-sumber dalam daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dan peraturan daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu tumpuan dalam pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi dengan menggunakan biaya dari Pendapatan Asli daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah (Priambodo, 2014).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, kinerja usaha milik daerah, kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan sumber pendapatan daerah lain yang sah (Mardiasmo, 2002). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18

menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (selanjutnya disingkat PAD) adalah pendapatan asli daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil penatausahaan barang milik tersendiri dan peningkatan PAD lain yang sah.

Kebijakan pendapatan asli daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam pelayanan public. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan public semakin baik.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki potensi yang cukup besar dalam menjalankan fungsi daripada otonomi daerah, salah satunya bagaimana PAD sebagai salah satu penerimaan daerah menjadi sumber pemasukan yang cukup besar dalam proses pembanguana daerah. Hal ini dapat menjadi pemantik yang cukup baik bagi sirkulasi ekonomi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melihat kota yang cukup menarik perhatian masyarakat domestik maupun mancanegara ini memiliki satu keunikan yan dimiliki, yaitu: inovasi dan kreativitas yang selalu diciptakan di kota ini. Artinya segala sesuatu yang bisa diciptakan memiliki suatu nilai yang dapat ditawarkan ke publik (Karomy, 2021)

Salah satu cara untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat dari sisi keuangan daera adalah dengan melihat struktur pendapatan asli daerah yang ada. Apabila Pendapatan Asli Daerah yang diterima semakin besar, maka akan semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah dalam mengambil tanggungjawab yang lebih besar. Namun, semakin rendah rasio komposisi pendapatan daerah

terhadap penerimaan daerah, semakin tinggi ketergantungan pada pusat. Dampak yang dirasakan masyarakat dari peningkatan pendapatan asli daerah adalah pembangunan yang baik. Pembangunan meliputi berbagai bidang seperti pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

2.3 Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator terpenting dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan penggunaan tenaga kerja guna meningkatkan faktor produksi perusahaan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto regional juga akan menyebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan adanya permintaan tenaga kerja yang tinggi dalam rangka mengentaskan pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi bergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi, yang dapat dilihat dari tingkat PDRB. Pandangan ini mengasumsikan bahwa perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh dan bahwa faktor-faktor produksinya digunakan sepenuhnya. Dengan kata lain akan terus tumbuh, dan itu semua tergantung pada pertumbuhan penduduk, tenaga kerja yang optimal, dan penyerapan tenaga kerja (Arsyad, 1997)

2. Hubungan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Penentuan upah minimum dengan teori upah efisiensi memungkinkan pekerja untuk meningkatkan nutrisinya agar lebih produktif dalam jangka panjang (Sumarsono, 2009). Upah akan melakukan penyesuaian terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja pada model keseimbangan pasar tenaga kerja. keseimbangan antara upah dan jumlah tenaga kerja akan tercapai

pada saat Ketika upah meningkat maka jumlah permintaan tenaga kerja lebih kecil dari penawaran tenaga kerja, begitupun sebaliknya, apabila upah minimum lebih rendah dari upah sebelumnya maka permintaan tenaga kerja lebih besar dibandingkan penawaran tenaga kerja (Mankiw, 2003).

Tingkat upah tenaga kerja adalah salah satu factor yang mempengaruhi tingkat biaya produksi perusahaan. Ketika upah mengalami peningkatan sehingga berdampak pada kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya harga barang per unitnya akan mengalami peningkatan. Sebagai akibatnya, Apabila terjadi produk yang tidak terjual, respon masyarakat akan cepat mengurangi konsumsi, dan dalam situasi ini perusahaan terpaksa mengurangi produksi. Adanya pengurangan jumlah produksi membuat kebutuhan akan tenaga kerja akan berkurang. Ketika upah mengalami kenaikan, maka banyak perusahaan yang menggantikan kebutuhan tenaga kerja dengan kebutuhan barang modal seperti mesin. Sehingga menyebabkan kapasitas tenaga kerja yang diminta akan menurun.

3. Hubungan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

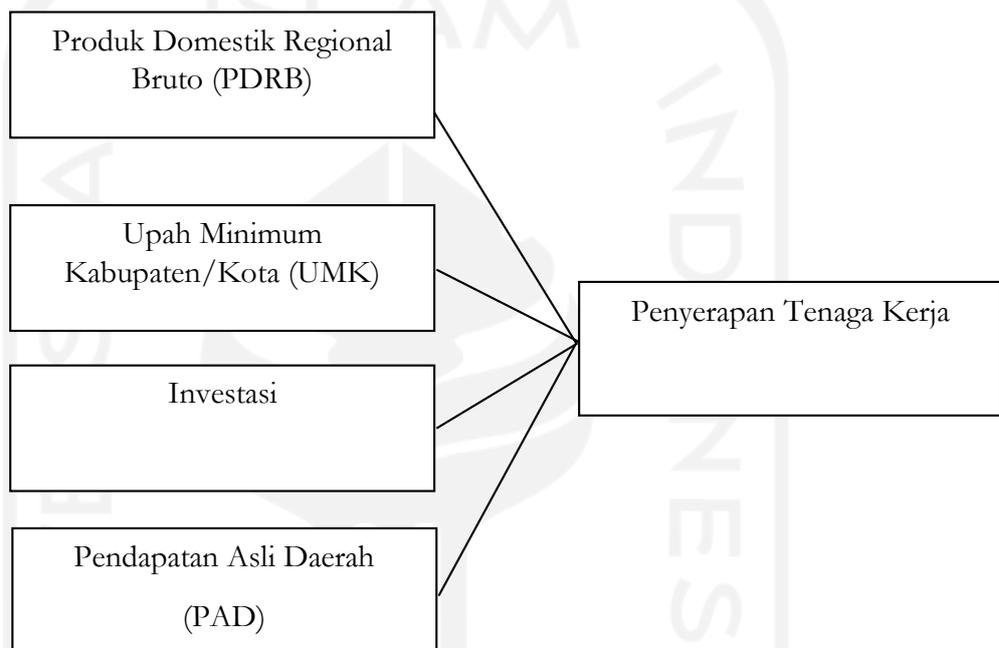
Investasi ialah salah satu peran penting dalam pergerakan kegiatan ekonomi. Investasi adalah kegiatan penanaman modal atau bagi sektor swasta yang digunakan untuk membeli barang dan peralatan manufaktur untuk memfasilitasi kapasitas produksi perusahaan dan menghasilkan keuntungan. Semakin banyak investasi, semakin besar skala perdagangan dan produksi. Kesempatan kerja meningkat seiring dengan meningkatnya skala produksi. Dengan kata lain, dengan meningkatnya aktivitas produksi, perusahaan akan membutuhkan tambahan tenaga kerja karena untuk memenuhi kebutuhan produksi. Akibatnya, pendapatan per kapita meningkat, yang mengarah pada kemakmuran rakyat. Penanaman modal merupakan faktor yang sangat krusial dalam rangka peningkatan serapan tenaga kerja. Apabila investasi semakin banyak semakin banyak pekerja yang dibutuhkan perusahaan.

4. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dan dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri (Warsito, 2001). Sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan usaha daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Hal yang mendasari hubungan tersebut adalah bahwa dengan meningkatnya PAD setiap tahun, PAD tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, terutama upaya peningkatan kesempatan kerja. PAD berfungsi untuk memenuhi kebutuhan publik. Dalam pemenuhan kebutuhan publik tersebut dapat diaktifkan melalui program pemerintah daerah yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masalah yang dapat diatasi PAD antara lain pengangguran, inflasi dan resesi (Barimbing & Karmini, 2015)

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah bagian dari tinjauan pustaka yang berisi ringkasan dari semua landasan teoritis penelitian ini, dan skema singkat proses penelitian dijelaskan dalam kerangka penelitian ini. Berikut skemanya:



2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan rumusan masalah yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Penelitian secara Simultan

H_a : PDRB, UMR, Investasi, dan PAD secara Bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Hipotesis Penelitian secara Parsial

H_1 : PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

H₂: UMK berpengaruh negative terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

H₃: Investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

H₄: PAD berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dan Disnakertrans. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi, seperti membaca atau merekam data dan informasi dari buku dan media elektronik cetak tentang subjek yang ingin penulis bahas. Data sekunder yang digunakan adalah data panel yang menggabungkan data cross-sectional dan time-series untuk 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2014 hingga 2020.

Berikut data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Data Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi DIY

Tingkat penyerapan tenaga kerja dinyatakan dalam jumlah penduduk yang bekerja, maka data yang digunakan adalah jumlah penduduk bekerja berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2014-2020..

2. Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020

3. Data Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020

4. Data Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020

3.2 Definisi Variabel Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 variabel yakni terdiri dari 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen

dalam penelitian ini adalah PDRB riil (X_1), UMK (X_2), investasi (X_3) dan PAD (X_4). Jumlah orang bekerja menjadi variabel dependen dalam penelitian ini.

Berikut adalah identifikasi masing-masing variabel dalam penelitian ini:

1. Penyerapan Tenaga Kerja (Y)

Penyerapan pekerjaan adalah jumlah lapangan pekerjaan yang dapat terisi, tercermin dalam jumlah orang yang dipekerjakan. Data penyerapan tenaga kerja pada penelitian ini menggunakan data jumlah penduduk bekerja di Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam satuan jiwa.

2. PDRB Riil (X_1)

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah PDRB Riil. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB Riil) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu dengan tujuan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Ketika suatu sektor usaha mampu menghasilkan barang, maka sektor usaha tersebut akan mengambil peran tenaga kerja dalam proses produksinya. Sehingga apabila semakin banyak barang yang dihasilkan maka menggambarkan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang tersebut, dengan kata lain PDRB memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja. Data PDRB pada penelitian ini menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam satuan juta rupiah.

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (X_2)

Upah minimum erat kaitanya dengan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan oleh upah minimum dapat menjadi tolak ukur bagi perusahaan dan pekerja mengenai permintaan dan penawaran tenaga kerja. Apabila upah minimum di suatu daerah meningkat, maka permintaan tenaga kerja akan berkurang karena upah dianggap sebagai beban bagi perusahaan. Sebaliknya,

jika upah minimum di suatu daerah rendah, maka permintaan tenaga kerja akan cenderung tinggi. Data UMK pada penelitian ini menggunakan data UMK di Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam satuan rupiah.

4. Investasi (X_3)

Investasi adalah indikator penting dalam penciptaan lapangan kerja. Investasi itu sendiri juga merupakan salah satu langkah penciptaan lapangan kerja. Kehadiran investasi menciptakan hubungan dengan industri, membuat sektor-sektor yang kurang berkembang menjadi lebih produktif daripada sektor-sektor besar, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja. Data Investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Pemanaman Modal Asing. Data investasi pada penelitian ini menggunakan data dari jumlah PMA dan PMDN di Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020 yang bersumber dari Portal National Single Window for Investment (NSWI) dalam satuan USD.

5. Pendapatan Asli Daerah (X_5)

Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah seluruh penerimaan yang diperoleh daerah dari semua sumber yang ada di dalam daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan daerah itu sendiri. Salah satu cara untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat dari sisi keuangan daerah adalah dengan melihat struktur pendapatan asli daerah. Ketika pendapatan daerah meningkat maka akan membawa pada kelancaran pembangunan, dimana ketika pembangunan terwujud akan memobilisasi tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja juga meningkat. Pembangunan tersebut dalam berbagai sektor, antara lain pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Data PAD pada penelitian ini menggunakan PAD di Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam satuan juta rupiah.

3.3 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel yang menggabungkan data time series dan cross-section. Untuk data panel, derajat kebebasan yang dihasilkan semakin besar dengan semakin banyaknya data yang tersedia (Widarjono, 2018). Sementara itu, regresi dalam penelitian ini akan diolah menggunakan program Eviews 9.

3.1.1 Model Estimasi Data Panel menurut Widarjono, (2018) menjelaskan bahwa terdapat tiga model dalam mengestimasi data panel, yaitu:

a. Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model adalah metode yang sangat sederhana di antara pendekatan data panel lainnya, yakni hanya menggabungkan data time series dan data cross section tanpa mempertimbangkan perbedaan waktu atau perbedaan individu. Karena model memiliki intersep yang tetap dan tidak bervariasi secara acak, maka tidak dapat membedakan perbedaan lokasi dan waktu (Kuncoro, 2012). Dengan kata lain, perilaku individu diberlakukan sama pada periode waktu yang berbeda. Persamaan common effect untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB}_{it} + \beta_2 \text{UMK}_{it} + \beta_3 \text{Investasi}_{it} + \beta_4 \text{PAD}_{it} + e_i$$

dimana:

- Y_i : Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2020
- PDRB: Nilai PDRB atas harga konstan Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2020
- UMK: Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2020
- Investasi: Realisasi Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2020

- PAD: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2020
- β : Koefisien Regresi
- i: Jumlah Observasi
- t: Waktu
- i x t: Data Panel
- e_i : Nilai Residual/ faktor pengganggu di luar model

b. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model menganggap bahwa ada perbedaan intersep antar individu, namun tidak terdapat perbedaan intersep dari waktu ke waktu. Variabel dummy, juga disebut least square dummy variabel (LSDV), digunakan dalam estimasi data panel untuk memeriksa perbedaan intersep. Model fixed effect untuk penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDR_{it} + \beta_2 UMK_{it} + \beta_3 Investasi_{it} + \beta_4 PAD_{it} + \beta_5 D_{1i} + \dots + \beta_n D_{ni} + e_i$$

di mana:

- D_{1i} : 1 untuk kabupaten/kota X dan 0 untuk kabupaten/kota lainnya

c. Random Effect Model (REM)

Random Effect Model diujikan guna memperkirakan data panel ketika ada variabel pengganggu yang memiliki kemungkinan saling bergantung antara individu dan dari waktu ke waktu. Random effect model ini juga dapat ditujukan untuk mengatasi konsekuensi dari degree of freedom dan kurangnya efisiensi parameter. Model random effect untuk penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDR_{it} + \beta_2 UMK_{it} + \beta_3 Investasi_{it} + \beta_4 PAD_{it} + V_{it}$$

di mana:

- $Vit: e_i + u_i$

3.1.2 Pemilihan Model

Dalam bukunya Widarjono, (2018) terdapat beberapa pengujian untuk menentukan model yang tepat, sebagai berikut:

a. Uji Chow

Uji Chow memungkinkan untuk memilih model mana yang paling cocok antara model Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Hasil dari Uji Chow dapat diketahui dengan melihat p-value. Apabila p-value lebih kecil daripada alpha maka menolak H_0 . Sedangkan apabila p-value lebih besar daripada alpha maka gagal menolak H_0 .

Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_0 : Menggunakan model Common Effect

H_a : Menggunakan model Fixed Effect

b. Uji Hausman

Uji hausman memungkinkan untuk memilih model yang paling cocok antara model Fixed Effcet Model dan Random Effect Model. Pengujian ini dilihat dari apabila nilai p-value lebih kecil daripada alpha maka akan menolak H_0 . Tetapi apabila p-value lebih besar daripada alpha maka akan gagal menolak H_0 atau menerima H_a . Hipotesisnya adalah:

H_0 : Menggunakan model Random Effect

H_a : Menggunakan model Fixed Effect

c. Uji LM

Uji LM memungkinkan untuk memilih model mana yang paling cocok antara model Common Effect Model dan Random Effect Model. Hasil dari Uji LM ini dapat dilihat dengan nilai probabilitas Breusch Pagan. Apabila nilai probabilitas Breusch Pagan lebih kecil daripada alpha maka akan menolak H_0 .

Tetapi apabila nilai probabilitas Breusch Pagan lebih besar daripada alpha maka akan gagal menolak H_0 .

Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_0 : Menggunakan model Common Effect

H_a : Menggunakan model Random Effect

3.1.3 Uji Statistik

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Simultan (Uji F), Uji Parsial (Uji t) dan Koefisien Determinasi (Widarjono, 2018). Penjelasan masing-masing pengujian adalah sebagai berikut:

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan ditujukan guna mengetahui pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam pengujian ini adalah:

$H_0: \beta_1: \beta_2: \beta_3: \beta_4: 0$

$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$

Jika F hitung lebih besar daripada F kritis maka akan menolak H_0 . Tetapi apabila F hitung lebih kecil daripada F kritis maka akan gagal menolak H_0 atau menerima H_a

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial ditujukan guna melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel lain dianggap tetap. Hipotesis pada pengujian ini adalah:

- H_0 : Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
- H_a : Variabel dependen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Jika nilai t hitung lebih kecil daripada t kritis maka akan menerima H_0 . Tetapi apabila nilai t hitung lebih besar daripada nilai t kritis maka akan menolak H_0 .

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ditujukan untuk melihat serta menjelaskan seberapa besar persentase variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Untuk melihat hal tersebut, maka yang perlu dilihat adalah nilai R^2 pada hasil regresi.

3.1.4 Perhitungan Elastisitas

Menurut Dumairy (2004) konsep elastisitas sebenarnya adalah penerapan ekonomi dari teori diferensiasi dalam matematika. Perhitungan elastisitas permintaan tenaga kerja merupakan persentase perubahan permintaan tenaga kerja mengikuti 1% perubahan variabel independen yang mempengaruhinya. Elastisitas dalam di definisikan sebagai berikut:

$$\varepsilon = \frac{\% \Delta y}{\% \Delta x} = \frac{\frac{\Delta y}{x}}{\frac{\Delta x}{x}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \times \frac{x}{y}$$

Dimana:

Δy = perubahan Y pada periode t dan (t-1)

Δx = perubahan X pada periode t dan (t-1)

Y = nilai Y rata-rata pada periode t dan (t-1)

X = nilai X rata-rata pada periode t dan (t-1)

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

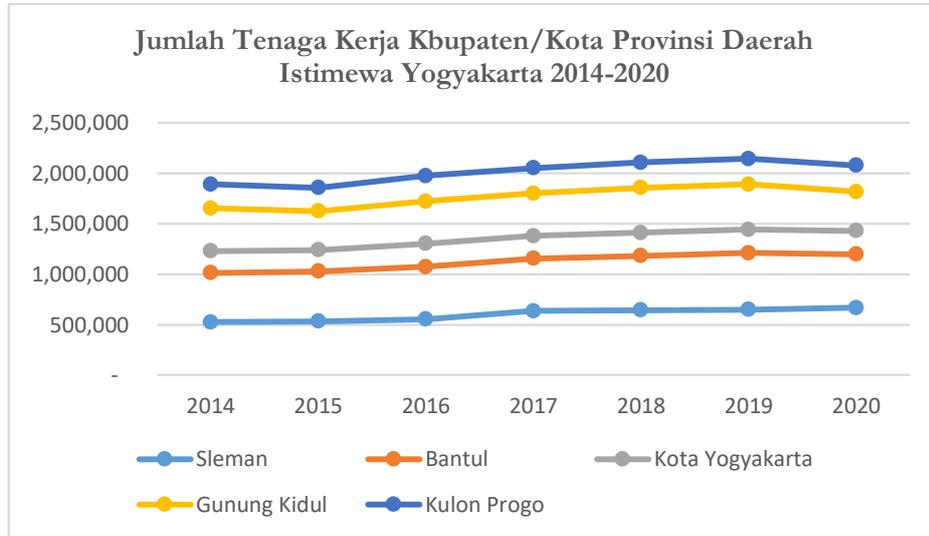
4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Disnakertrans Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan adalah Jumlah Orang Bekerja, PDRB Riil, UMK, Investasi serta PAD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Table 1 Statistik Deskriptif

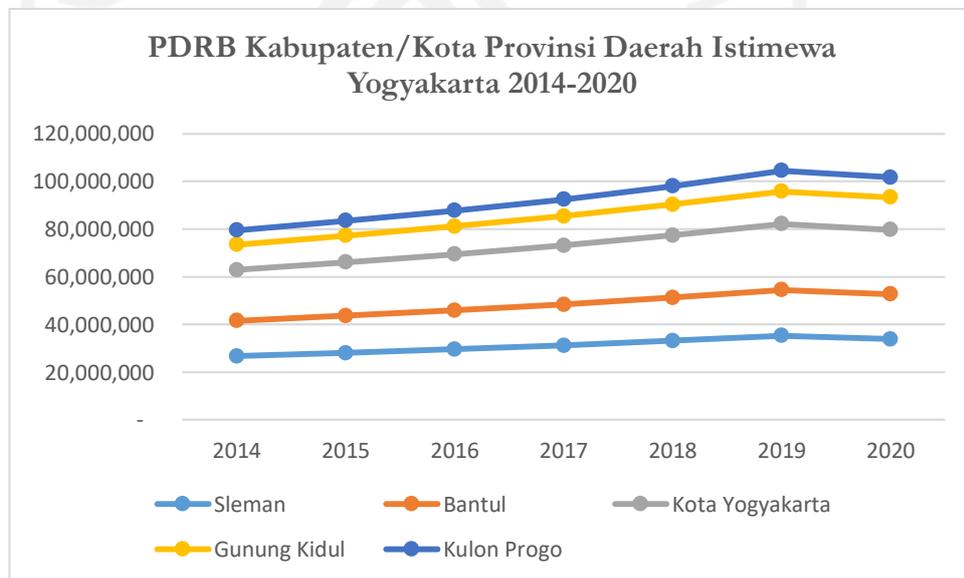
Kabupaten/Kota	Variabel	TK (Jiwa)	PDRB Riil (Rupiah)	UMK (Rupiah)	Investasi (Rupiah)	PAD (Rupiah)
Sleman	Min	526,171	26,713,071	1,127,000	76,199	679,577,509
	Max	649,763	35,289,808	1,701,000	1,439,670	576,337,600
	Mean	579,741	29,730,849	1,337,400	506,628	867,643,469
Bantul	Min	488,734	14,851,124	1,125,500	4,772	357,411,064
	Max	561,529	19,154,769	1,790,500	245,865	469,800,000
	Mean	521,629	17,166,935	1,429,173	81,181	408,644,019
Kota Yogyakarta	Min	210,049	21,307,763	1,173,300	70,562	470,634,762
	Max	231,876	27,685,286	2,004,000	490,537	671,170,000
	Mean	224,776	24,690,355	1,580,279	239,622	555,937,751
Gunung Kidul	Min	386,458	10,639,792	988,500	1,005	159,304,338
	Max	448,567	13,605,074	1,705,000	53,777	245,880,000
	Mean	419,353	12,257,313	1,342,900	25,027	205,287,851
Kulon Progo	Min	232,190	6,004,316	1,069,000	31,873	158,623,927
	Max	259,421	8,770,750	1,750,500	4,885,726	247,920,000
	Mean	247,897	7,250,524	1,386,917	1,669,224	201,730,557

Gambar 8 Grafik Statistik Deskriptif Tenaga Kerja



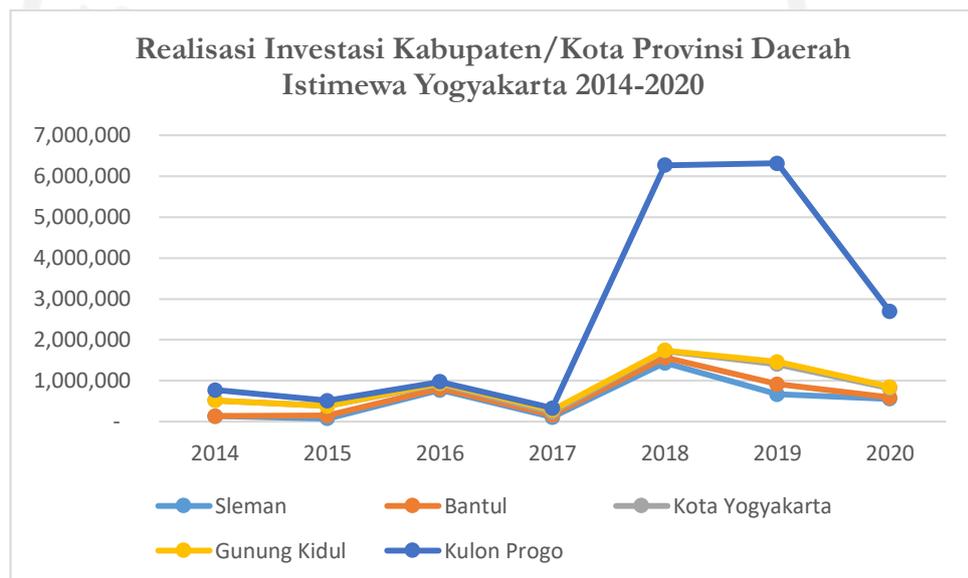
Berdasarkan gambar 7 mengenai jumlah orang bekerja paling tinggi adalah Kabupaten Sleman dengan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 579,741 Jiwa. Sementara itu, rata-rata penyerapan tenaga kerja paling rendah terjadi di Kota Yogyakarta, yakni sebesar 224,776 Jiwa. Hal ini dikarenakan perusahaan di Kota Yogyakarta yang terbilang sedikit dan belum mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.

Gambar 9 Grafik Statistik Deskriptif PDRB



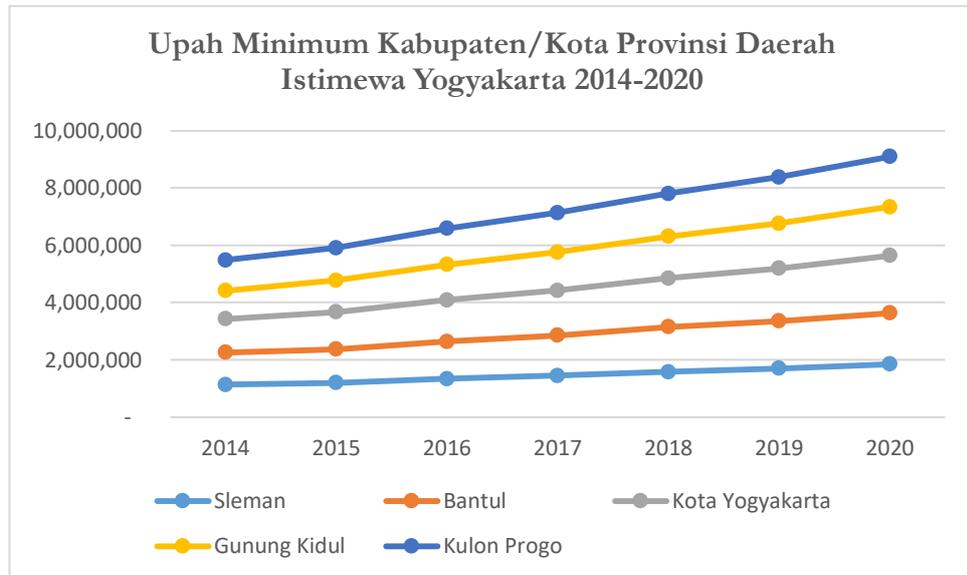
Berdasarkan gambar 8 mengenai PDRB Riil yang paling tinggi adalah kabupaten dengan rata-rata 29,730,849juta. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sleman terdapat sektor unggulan dan sektor potensial, yaitu sektor bangunan berupa perdagangan, hotel, jumlah perguruan tinggi yang banyak, dan restoran yang berada di Kabupaten Sleman. Sedangkan PDRB Riil terendah berada di Kota Yogyakarta dengan rata-rata 24,690,355juta.

Gambar 10 Grafik Statistik Deskriptif Investasi



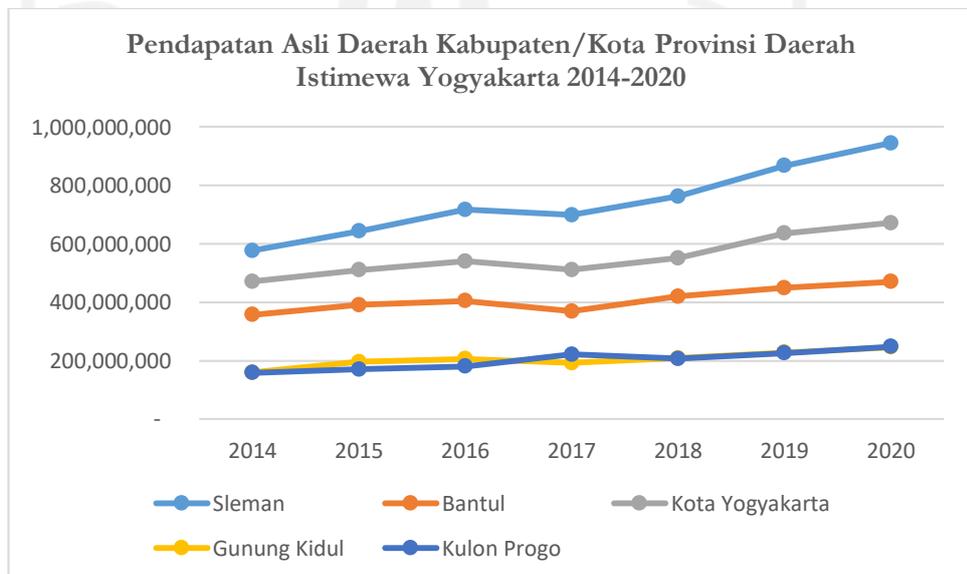
Berdasarkan gambar 9 Investasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kulon Progo yakni sebesar 1,669,224USD. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Kabupaten Kulon Progo yang amat potensial serta memadainya akses dan infrastruktur di Kabupaten ini. Salah satu sektor yang menyumbang angka investasi tinggi di Kabupaten Kulon Progo adalah sektor minyak dan gas (migas) atau lebih spesifiknya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kemudian nilai investasi paling rendah berada di Kabupaten Gunung Kidul, yakni sebesar Rp 25,027USD. Sektor pariwisata yang menjadi penyumbang besar investasi di Kabupaten Gunung Kidul sempat terhenti dikarenakan dampak dari pandemi. Gunung Kidul juga menjadi kawasan karst yang digunakan untuk penelitian juga membuat daerah tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara besar besaran sehingga tidak ada pembangunan baru selain penambahan investasi yang sudah ada.

Gambar 11 Grafik Statistik Deskriptif UMK



Berdasarkan gambar 10 mengenai UMK paling tinggi berada di Kota Yogyakarta, dengan rata-rata nilai upah yakni sebesar Rp 1.580.279. sedangkan UMK terendah berada di Kabupaten Gunung Kidul dengan rata-rata sebesar Rp 1.342.900

Gambar 12 Grafik Statistik Deskriptif PAD



Berdasarkan gambar 11 mengenai PAD tertinggi berada di Kabupaten Sleman dengan rata-rata sebesar 867.643.469. Sedangkan PAD terendah berada di Kabupaten Kulon Progo dengan rata-rata yakni sebesar 201,730,557

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Pemilihan Model

4.2.1.1 Uji Chow

Uji Chow diperlukan untuk melihat manakah model yang layak digunakan antara Common Effect Model dengan Fixed Effect Model. Berikut adalah hipotesisnya:

H_0 : Menggunakan Common Effect Model

H_a : Menggunakan Fixed Effect Model

Asumsi:

Jika P-value $< \alpha$ 5% menerima H_a

Jika P-value $> \alpha$ 5% menerima H_0

Effect test	Statistic	d.f	Prob
Period F	353.428832	(4.26)	0.0000
Period Chi- square	140.493645	4	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian di atas, didapatkan nilai probabilitas chi square $0,0000 < \alpha$ 5% sehingga menolak H_0 atau menerima H_a , dalam kata lain model yang layak digunakan adalah model Fixed Effect Model.

4.2.1.2 Uji Hausman

Uji Hausman diperlukan untuk melihat model yang paling layak digunakan antara Fixed Effect Model dengan Random Effect Model. Hipotesisnya adalah:

H_0 : Menggunakan Fixed Effect Model

Ha: Menggunakan Random Effect Model

Test summary	Chi-sq statistic	Chi-sq d.f	Prob
Cross section random	1413.715326	4	0.0000

Asumsi:

Jika P-value $< \alpha$ 5% menerima Ha

Jika P-value $> \alpha$ 5% menerima Ho

Berdasarkan hasil uji diatas, dapat terlihat bahwa nilai probabilitas 0.0000 $< \alpha$ 5% sehingga menolak Ho atau menerima Ha, dengan kata lain model yang layak digunakan adalah Fixed Effect Model.

4.2.1.3 Uji LM

Uji LM digunakan untuk melihat model yang layak digunakan antara Common Effect Model dengan Random Effect Model. Hipotesisnya adalah:

H0: Menggunakan Common Effect Model

Ha: Menggunakan Random Effect Model

Asumsi:

Jika P-value $< \alpha$ 5% menerima Ha

Jika P-value $> \alpha$ 5% menerima H0

	Cross Section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch Pagan	86.87890 (0.0000)	2.111484 (0.1462)	88.99038 (0.0000)

Berdasarkan hasil uji diatas, nilai probabilitas Breusch Pagan $< \alpha$ 5% sehingga menolak H_0 atau menerima H_a , dengan kata lain model yang layak digunakan adalah Random Effect Model.

4.2.2 Model Regresi Panel Fixed Effect

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, model yang paling layak digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah model Fixed Effect.

Dependent Variable: TENAGAKERJA?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 06/24/22 Time: 18:32
 Sample: 2014 2020
 Included observations: 7
 Cross-sections included: 5
 Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	148759.8	42674.05	3.485955	0.0018
PDRB?	0.016714	0.005051	3.309006	0.0027
UMK?	-0.061616	0.033168	-1.857663	0.0746
INVESTASI?	-0.000519	0.003990	-0.130016	0.8976
PAD?	8.10E-05	0.000111	0.726685	0.4739
Fixed Effects (Cross)				
_SLEMAN--C	-36527.16			
_BANTUL--C	140940.3			
_YOGYAKARTA--C	-284197.8			
_GUNUNGKIDUL--C	131852.2			
_KULONPROGO--C	47932.41			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.986647	Mean dependent var	403196.6	
Adjusted R-squared	0.982538	S.D. dependent var	153348.9	
S.E. of regression	20264.12	Akaike info criterion	22.88813	
Sum squared resid	1.07E+10	Schwarz criterion	23.28807	
Log likelihood	-391.5422	Hannan-Quinn criter.	23.02619	
F-statistic	240.1357	Durbin-Watson stat	1.760326	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berikut merupakan model regresi berganda untuk penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 UMK_{it} + \beta_4 Investasi_{it} + \beta_5 PAD_{it} + \text{Vit}$$

$$\text{Tenaga_Kerja} = 148759.8 + 0.016714\text{PDRB} - 0.061616\text{UMK} - 0.000519\text{Investasi} + 8.10\text{E-}05\text{PAD}$$

4.2.3 Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Hasil Uji t

Uji-t adalah uji yang ditujukan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen yaitu PDRB riil, upah minimum kabupaten, investasi dan pendapatan asli daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian dilakukan uji-t dengan membandingkan nilai probabilitas dan alpha 5% dan 10%.

1. Pengaruh PDRB Riil terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pengujian regresi dengan pendekatan Fixed Effect Model mendapatkan hasil bahwa nilai koefisien PDRB sebesar 0,016714 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0027. Nilai probabilitas 0,0027 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga menolak H_0 atau menerima H_1 yang artinya PDRB secara parsial berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Merujuk pada penjelasan diatas, hipotesis awal yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sesuai atau terbukti.

2. Pengaruh UMK terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pengujian regresi dengan pendekatan Fixed Effect Model mendapatkan hasil bahwa nilai koefisien UMK sebesar -0,061616 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0746. Nilai probabilitas 0,0746 lebih kecil dari alpha 0,1 sehingga menolak H_0 atau menerima H_2 yang artinya UMK secara parsial berpengaruh negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Merujuk pada penjelasan diatas, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa UMK memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sesuai atau terbukti.

3. Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pengujian regresi dengan pendekatan Fixed Effect Model mendapatkan hasil bahwa nilai koefisien investasi sebesar -0,00519 dengan nilai probabilitas sebesar 0,8976. Nilai probabilitas 0.8976 lebih besar dari alpha 0,1 sehingga menerima H_0 atau menolak H_3 yang artinya investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Merujuk pada penjelasan diatas, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Investasi memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tidak sesuai atau tidak terbukti.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pengujian regresi dengan pendekatan Fixed Effect Model mendapatkan hasil bahwa nilai koefisien PAD sebesar 8.10E-05 dengan nilai probabilitas sebesar 0.4739. Nilai probabilitas 0.4739 lebih besar dari alpha 0,1 sehingga menerima H_0 atau menolak H_4 yang artinya PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Merujuk pada penjelasan diatas, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tidak sesuai atau tidak terbukti.

4.2.3.2 Hasil Uji F

Uji F dilakukan guna mengetahui variabel independen, yakni PDRB Riil, UMK, Investasi, dan PAD memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yakni jumlah orang bekerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Variabel	Prob. F
PDRB Riil	0.0000
UMK	
Investasi	
PAD	

Pengujian regresi dengan pendekatan Fixed Effect Model dapat dilihat bahwa nilai probabilitas F adalah $0,0000 < \alpha 0,05$, sehingga menolak H_0 yang artinya PDRB Riil, UMK, Investasi dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2.3.3 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian regresi dengan pendekatan Fixed Effect Model diperoleh nilai adjusted R^2 sebesar 0,986647. Secara singkat variabel independen dalam penelitian ini yaitu PDRB riil, UMK, investasi dan PAD dapat menjelaskan 98,6647% penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sisanya sebesar 1,3353% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.2.4 Analisis antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari hasil pengolahan data dengan model fixed effect menggunakan Eviews 9 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai intersep masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

Table 2 Perbedaan Intersep Antar Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Koefisien Kabupaten/Kota	Koefisien C	Intersep
Kabupaten Sleman	-36527.16	148759.8	112232.64
Kabupaten Bantul	140940.3	148759.8	289700.1
Kota Yogyakarta	-284197.8	148759.8	-135438
Kabupaten Gunung Kidul	131852.2	148759.8	280611.2
Kabupaten Kulon Progo	47932.41	148759.8	196692.21

Dalam menginterpretasikan hasil regresi data panel menggunakan model fixed-effect. Dilihat dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda. Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat penyerapan tertinggi ada di Kabupaten Bantul sebesar 289700,1 dan tingkat penyerapan tenaga kerja terendah di kota Yogyakarta sebesar -135.438. Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah strategis sebagai kawasan industri khususnya sektor kerajinan di DIY menunjukkan bahwa jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan nilai investasi industri kerajinan di Kabupaten Bantul paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha kerajinan di masa mendatang dan memperbanyak tenaga kerja terserap (Desembriarto & Suseno, 2004)

4.2.5 Perhitungan Elastisitas

Perhitungan elastisitas permintaan tenaga kerja merupakan persentase perubahan permintaan tenaga kerja mengikuti 1% perubahan variabel independen yang mempengaruhinya. Perhitungan angka elastisitas dalam penelitian ini didapat dari rumus poin 3.1.4 pada bab 3.

Table 3 Perbedaan Elastisitas Variabel

Variabel	Koefisien Variabel	Angka Elastisitas	Kategori
PDRB	0.016714	0.77	Inelastis
UMK	-0.061616	-0.22	Inelastis
Investasi	-0.000519	-0.0065	Inelastis
PAD	8.10E-05	0.085	Inelastis

4.3 Pembahasan

1. Analisis Pengaruh PDRB Riil Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil pengujian regresi dengan pendekatan Fixed Effect Model menunjukkan bahwa PDRB riil secara parsial berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Koefisien PDRB adalah 0,016714 dan memiliki pengaruh positif. Artinya, kenaikan 1 juta

dalam Produk Domestik Regional Bruto akan menghasilkan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,016714 jiwa. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang berlaku dimana ketika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan, maka meningkatkan kebutuhan input dan dengan demikian permintaan tenaga kerja semakin tinggi (Mankiw, 2000). Tingginya PDRB disuatu daerah membuktikan bahwa jumlah output yang diproduksi di daerah tersebut juga tinggi. Ketika perusahaan menghasilkan banyak output maka perusahaan membutuhkan tenaga kerja lebih untuk memenuhi jumlah barang yang di produksi, sehingga penyerapan tenaga kerja juga semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jafary, (2018) yang mendapatkan hasil bahwa PDRB berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal yang mendasari PDRB berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja adalah ketika PDRB mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat, hal itu memerlukan tambahan tenaga kerja sebagai faktor produksi guna memenuhi permintaan agregat yang meningkat.

Terjadinya peningkatan produk domestik regional bruto ditandai oleh peningkatan output. Hal ini akan menyebabkan peningkatan jumlah tenaga yang dipekerjakan yang tercermin pada peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat disebabkan oleh peningkatan pendapatan atau upah masyarakat. Tingginya daya beli penduduk juga meningkatkan permintaan barang atau jasa yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran (As'har, 2015)

Berdasarkan perhitungan elastisitas, dapat disimpulkan bahwa PDRB dengan koefisien 0.7667, bersifat inelastic terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang artinya persentase perubahan perubahan PDRB lebih besar daripada persentase perubahan penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, apabila PDRB naik sebesar 1% maka, penyerapan tenaga kerja akan naik sebesar 0.7677%

2. Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil pengujian regresi dengan menggunakan pendekatan Fixed Effect Model menunjukkan bahwa UMK secara parsial berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Koefisien UMK adalah $-0,331102$ dan memiliki pengaruh negatif. Dengan kata lain, kenaikan UMK sebesar 1 rupiah mengurangi penyerapan tenaga kerja sebesar $0,331102$ jiwa. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang berlaku bahwa permintaan tenaga kerja menurun seiring dengan kenaikan upah. Upah merupakan beban yang ditanggung oleh perusahaan dikarenakan keuntungan produsen akan semakin rendah apabila upah mengalami kenaikan. Oleh karena itu, ketika tingkat upah naik, biaya produksi bagi produsen naik dan harga satuan per unit barang yang diproduksi naik. Hal ini mengurangi tingkat konsumsi masyarakat dan bahkan membuat orang semakin mungkin akan berhenti membeli. Akibatnya, banyak produk produsen tidak laku, dan produsen mengurangi produksinya. Penurunan barang modal dapat mempengaruhi pengurangan biaya tenaga kerja karena efek produksi (Simanjuntak, 1998)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Damayanti, (2019), yang mendapatkan hasil bahwa UMK berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hubungan negatif ini dilatar belakangi oleh upah keseimbangan ditentukan oleh penawaran dan permintaan tenaga kerja. Sedangkan upah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota yang telah ditentukan dan disepakato antara Pemerintah, pengusaha, Serikat Pekerja.

Berdasarkan perhitungan elastisitas, dapat disimpulkan bahwa UMK dengan koefisien -0.22 bersifat inelastic terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, artinya persentase perubahan UMK lebih kecil daripada persentase perubahan penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, apabila UMK naik sebesar 1% maka, penyerapan tenaga kerja akan turun sebesar 0.22% . Hal tersebut diduga banyak tenaga kerja terserap di sektor informal daripada sektor formal. Dimana sektor informal tersebut

tidak ditetapkan upah minimum tetapi upah yang diberikan bergantung pada kontribusi dan hasil yang diperoleh setiap hari maupun setiap bulan (Bappeda Jogjaprov, 2022)

3. Analisis Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil pengujian regresi dengan menggunakan pendekatan Fixed Effect Model menunjukkan bahwa investasi di Yogyakarta tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Koefisien investasi sebesar 0,049079 yang berarti peningkatan investasi sebesar 1 USD tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori dan hipotesis yang berlaku. Investasi merupakan awal dari kegiatan ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2003). Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perekonomian di mana output meningkat dengan setiap tambahan investasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Adrianto, 2013) yang menemukan bahwa investasi tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap. Menurut BPS DIY (2014) meskipun investasi meningkat dan UMP tinggi, tidak selalu meningkatkan tenaga kerja yang terserap, hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga kerja di Yogyakarta, dan didorong oleh faktor kondisi internal pegawai seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, tingkat kehadiran, inisiatif dan kreativitas, kesehatan dan perilaku/sikap. Berkenaan dengan faktor eksternal, antara lain disiplin kerja, tingkat kerjasama, rasa aman dan nyaman dalam bekerja, teknologi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kerja, dan wilayah kerja yang sesuai dengan bidang minat.

Berdasarkan perhitungan elastisitas, dapat disimpulkan bahwa Investasi dengan koefisien 0.00065 bersifat inelastic terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang artinya perubahan persentase Investasi lebih besar daripada perubahan persentase penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, apabila Investasi naik sebesar 1% maka penyerapan tenaga kerja akan naik sebesar 0.00065%

4. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil pengujian regresi dengan menggunakan pendekatan Fixed Effect Model menunjukkan bahwa PAD secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Koefisien PAD sebesar 0.866873 yang artinya setiap kenaikan PAD 1 juta maka tidak akan mempengaruhi Penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori dan hipotesis yang berlaku dimana menurut Darise, (2009) Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menutupi sebagian beban pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dimana pembangunan membutuhkan tenaga kerja sehingga terwujud Otonomi Daerah yang bertanggung jawab.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2018) yang mendapatkan hasil bahwa PAD tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Faktor yang menjadi penyebab Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sebagai akibat daripada pemerintah daerah yang dinilai masih kurang maksimal dalam melakukan anggaran dana di masing-masing daerah. Terdapat kemungkinan bahwa masih ada daerah dengan anggaran dana rendah sehingga menyebabkan kurangnya pembangnan sektor publik.

Berdasarkan perhitungan elastisitas, dapat disimpulkan bahwa PAD dengan koefisien 0.085 bersifat inelastic terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang artinya perubahan persentase pendapatan asli daerah lebih besar daripada perubahan persentase penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, apabila pendapatan asli daerah naik sebesar 1% maka, penyerapan tenaga kerja akan naik sebesar 0.085%.

BAB 5

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan uji regresi data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model yang telah dilakukan dengan PDRB Riil, UMK, Investasi, dan PAD sebagai variabel independen terhadap penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependen di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2020, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi berada di Kabupaten Bantul dengan intersep 289700,1, sedangkan tingkat penyerapan tenaga kerja terendah berada di Kota Yogyakarta dengan intersep sebesar -135,438.
2. Secara simultan, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kabupaten/Kota, Investasi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Produk Domestik Regional Bruto secara parsial memiliki pengaruh positif dan inelastis terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Upah Minimum Kabupaten/Kota secara parsial memiliki pengaruh negatif dan inelastis terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Investasi secara parsial tidak memiliki pengaruh dan inelastis terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh dan inelastis terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2 Implikasi

1. PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan PDRB untuk dipertahankan atau bahkan ditingkatkan agar semakin banyak tenaga kerja terserap dalam rangka pemenuhan output. Pada akhirnya hal tersebut dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kabupaten/Kota dengan tingkat upah minimum yang masih rendah dapat meningkatkan besaran upah minimumnya dengan tetap mempertimbangkan perusahaan marjinal. Hal tersebut agar tidak terjadi kesenjangan upah minimum yang terlalu besar antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Investasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini, yang diharapkan dapat ditingkatkan adalah kualitas sumber daya manusia agar dapat mengimbangi dengan investasi yang tinggi. Sehingga ketika investasi mengalami peningkatan, kualitas sumber daya manusia yang baik, akan dapat menyerap tenaga kerja yang tinggi.
4. Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Diharapkan pemerintah dapat memaksimalkan dalam melakukan anggaran dana di masing-masing daerah agar tidak terjadi ketimpangan anggaran dana daerah. Sebagai akibatnya, pembangunan sektor publik dapat ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Adrianto, R. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Studi Kasus Pada Industri Krupuk Rambak di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah*.
- Anindita, S. F. (2016). *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta : Pendekatan Regresi Panel Dinamis*.
- Arsyad, L. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- As'har, H. A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Oleh Sektor UMKM Di Indonesia. *Jurnal Imiah*, 2(3).
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-a). *Jumlah Penduduk menurut Kabupaten_Kota di DIY*.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-b). *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2010*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Upah Minimum Kabupaten_Upah Minimum Provinsi di DI Yogyakarta*.
- Bappeda Jogjaprov. (2022). *Statistik Ketenagakerjaan*.
http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/263-ketenagakerjaan
- Barimbing, Y. R., & Karmini, N. L. (2015). Pengaruh PAD, Tenaga Kerja, dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(5), 434–450.
- Bella, S. A. (2018). *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah(Tahun 2010 - 2016)*. Universitas Islam Indonesia.
- Biamrillah, A., & Nurhayati, F. S. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Karesidenan Semarang. *STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta*, 325–340.
- Damayanti, A. D. (2019). *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten / Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2012-2016)*. Universitas Islam Indonesia.
- Darise, N. (2009). *Darise, N. (2009). Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Indeks Jakarta.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*. UPP STIM YKPN.
- Feriyanto, N., & Sriyana, J. (2016). Labor absorption under minimum wage policy in Indonesia. *Regional Science Inquiry*, 8(1), 11–21.
- Jafary, R. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di D.I.Y. In *Universitas Islam Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.

- Julfira, N. V. (2021). *Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Investasi, PDRB Riil dan UMK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019*. Universitas Islam Indonesia.
- Karomy, M. F. R. Al. (2021). *Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi pada tahun 2014-2018)*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/25TAHUN2007UU.HTM>
- Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. (2003). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. In *Ketenagakerjaan* (Issue 1, p. 50).
- Kuncoro, H. (2002). Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 45–46.
- Kusnaini D. (1998). *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah: Teori serta Beberapa Potretnya di Indonesia*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mankiw, N. G. (2000). *Teori Ekonomi Makro (Terjemahan)*. Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2002). *Teori Makroekonomi* (4th ed.). Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2003). *Pengantar Ekonomi*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Pangastuti, Y. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 4(2), 203–211.
- Permenaker. (2005). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak*.
- Permenaker. (2012). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak*.
- Priambodo, A. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 3(4), 427–435.
- Rosalina, R. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor.
- Simanjuntak, P. J. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. LPFEUI.
- Simanjuntak, P. J. (1998). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. FEUI.
- Simanjuntak, P. J. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit

Fakultas Ekonomi UI.

Simanjuntak, P. J. (2005). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Sukirno, S. (2009). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers.

Sukirno, S. (2015). *Makro Ekonomi* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.

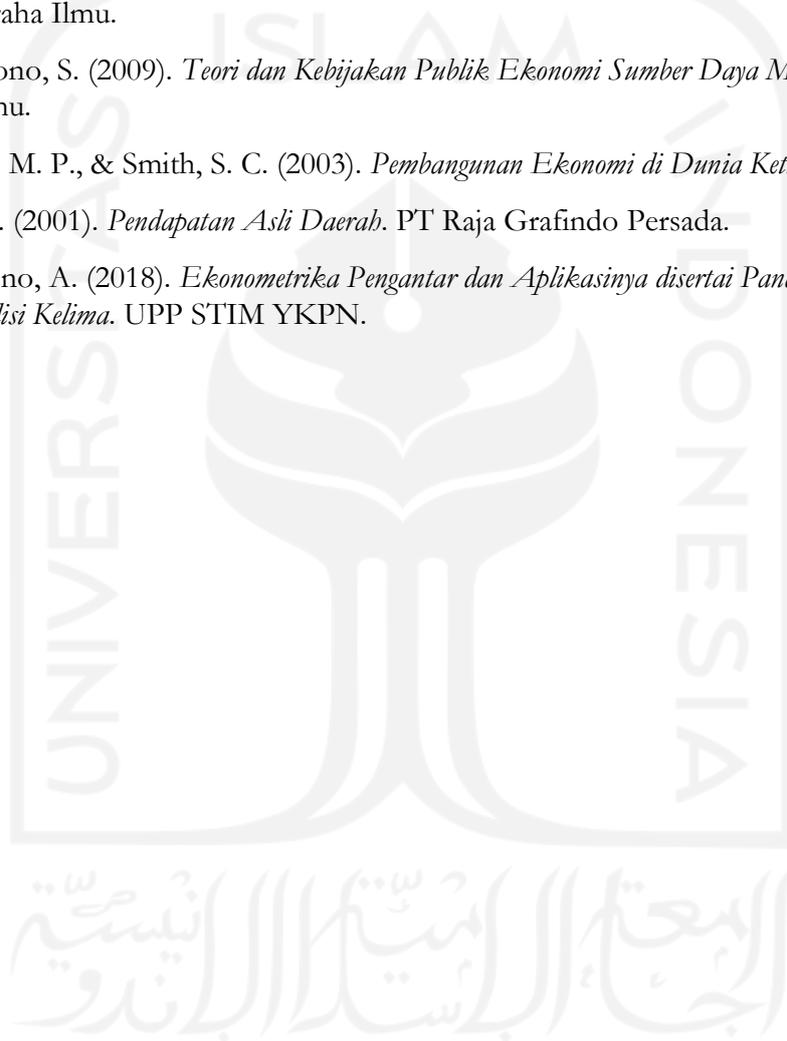
Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Graha Ilmu.

Sumarsono, S. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.

Warsito. (2001). *Pendapatan Asli Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan Eviews Edisi Kelima*. UPP STIM YKPN.



Lampiran

Lampiran 1 Statistik Deskriptif

Kabupaten/ Kota	Tahun	Tenaga Kerja (Jiwa)	PDRB (Juta)	UMK (Rupiah)	Investasi (USD)	PAD (Juta)
Sleman	2014	526,171	26,713,071	1,127,000	132,683	576,337,600
Sleman	2015	534,725	28,098,006	1,200,000	76,199	643,130,080
Sleman	2016	556,083	29,563,375	1,338,000	772,839	717,151,176
Sleman	2017	636,132	31,140,590	1,448,000	111,748	698,754,168
Sleman	2018	645,596	33,139,204	1,574,000	1,439,670	762,514,523
Sleman	2019	649,763	35,289,808	1,701,000	670,660	867,643,469
Sleman	2020	667,823	33,906,373	1,846,000	556,089	944,480,000
Bantul	2014	488,734	14,851,124	1,125,500	4,772	357,411,064
Bantul	2015	495,235	15,588,520	1,163,800	71,713	390,624,492
Bantul	2016	517,837	16,375,513	1,297,700	37,603	404,454,704
Bantul	2017	520,695	17,209,871	1,404,760	46,862	369,224,767
Bantul	2018	535,896	18,150,877	1,572,150	129,237	420,143,106
Bantul	2019	561,529	19,154,769	1,649,800	245,865	448,850,000
Bantul	2020	531,477	18,837,869	1,790,500	32,218	469,800,000
Kota Yogyakarta	2014	216,024	21,307,763	1,173,300	378,551	470,634,762
Kota Yogyakarta	2015	210,049	22,393,012	1,302,500	235,138	510,548,823
Kota Yogyakarta	2016	230,943	23,536,288	1,452,400	110,225	540,504,305
Kota Yogyakarta	2017	222,850	24,768,426	1,572,200	70,562	511,132,838
Kota Yogyakarta	2018	231,456	26,127,217	1,709,150	159,695	551,493,527
Kota Yogyakarta	2019	231,876	27,685,286	1,848,400	490,537	636,080,000
Kota Yogyakarta	2020	230,235	27,014,491	2,004,000	232,649	671,170,000
Gunung Kidul	2014	424,669	10,639,792	988,500	2,344	159,304,338
Gunung Kidul	2015	386,458	11,152,363	1,108,249	1,005	196,099,244
Gunung Kidul	2016	419,165	11,696,155	1,235,700	20,301	206,278,865
Gunung Kidul	2017	422,391	12,281,577	1,337,650	53,777	192,374,662
Gunung Kidul	2018	444,779	12,914,940	1,454,200	13,751	208,747,851
Gunung Kidul	2019	448,567	13,605,074	1,571,000	52,713	228,330,000
Gunung Kidul	2020	389,444	13,511,288	1,705,000	31,297	245,880,000
Kulon Progo	2014	236,536	6,004,316	1,069,000	251,456	158,623,927
Kulon Progo	2015	232,190	6,281,795	1,138,000	126,447	170,822,327
Kulon Progo	2016	252,691	6,580,676	1,268,870	31,873	180,273,364
Kulon Progo	2017	250,878	6,973,405	1,373,600	50,102	221,215,013
Kulon Progo	2018	251,545	7,728,409	1,495,250	4,529,139	207,069,271
Kulon Progo	2019	252,018	8,770,750	1,613,200	4,855,726	226,190,000
Kulon Progo	2020	259,421	8,414,316	1,750,500	1,839,825	247,920,000

Lampiran 2 Common Effect Models

Dependent Variable: TENAGAKERJA?

Method: Pooled Least Squares

Date: 06/24/22 Time: 18:32

Sample: 2014 2020

Included observations: 7

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	396517.4	142982.3	2.773192	0.0095
PDRB?	0.002855	0.012165	0.234672	0.8161
UMK?	-0.102371	0.108214	-0.946001	0.3517
INVESTASI?	-0.012829	0.023878	-0.537274	0.5950
PAD?	0.000255	0.000489	0.521389	0.6059
R-squared	0.260579	Mean dependent var		403196.6
Adjusted R-squared	0.161990	S.D. dependent var		153348.9
S.E. of regression	140380.0	Akaike info criterion		26.67366
Sum squared resid	5.91E+11	Schwarz criterion		26.89585
Log likelihood	-461.7890	Hannan-Quinn criter.		26.75036
F-statistic	2.643075	Durbin-Watson stat		0.048788
Prob(F-statistic)	0.053008			

Lampiran 3 Fixed Effect Models

Dependent Variable: TENAGAKERJA?

Method: Pooled Least Squares

Date: 06/24/22 Time: 18:32

Sample: 2014 2020

Included observations: 7

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	148759.8	42674.05	3.485955	0.0018
PDRB?	0.016714	0.005051	3.309006	0.0027
UMK?	-0.061616	0.033168	-1.857663	0.0746
INVESTASI?	-0.000519	0.003990	-0.130016	0.8976
PAD?	8.10E-05	0.000111	0.726685	0.4739
Fixed Effects (Cross)				
_SLEMAN--C	-36527.16			
_BANTUL--C	140940.3			
_YOGYAKARTA--C	-284197.8			
_GUNUNGGIDUL--C	131852.2			
_KULONPROGO--C	47932.41			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.986647	Mean dependent var	403196.6
Adjusted R-squared	0.982538	S.D. dependent var	153348.9
S.E. of regression	20264.12	Akaike info criterion	22.88813
Sum squared resid	1.07E+10	Schwarz criterion	23.28807
Log likelihood	-391.5422	Hannan-Quinn criter.	23.02619
F-statistic	240.1357	Durbin-Watson stat	1.760326
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4 Random Effect Models

Dependent Variable: TENAGAKERJA?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 06/24/22 Time: 18:32

Sample: 2014 2020

Included observations: 7

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 35

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	396517.4	20639.76	19.21134	0.0000
PDRB?	0.002855	0.001756	1.625693	0.1145
UMK?	-0.102371	0.015621	-6.553439	0.0000
INVESTASI?	-0.012829	0.003447	-3.721974	0.0008
PAD?	0.000255	7.06E-05	3.611931	0.0011
Random Effects (Cross)				
_SLEMAN--C	0.000000			
_BANTUL--C	0.000000			
_YOGYAKARTA--C	0.000000			
_GUNUNGKIDUL--C	0.000000			
_KULONPROGO--C	0.000000			

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.000000	0.0000
Idiosyncratic random	20264.12	1.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.260579	Mean dependent var	403196.6
Adjusted R-squared	0.161990	S.D. dependent var	153348.9
S.E. of regression	140380.0	Sum squared resid	5.91E+11
F-statistic	2.643075	Durbin-Watson stat	0.048788
Prob(F-statistic)	0.053008		

Unweighted Statistics

R-squared	0.260579	Mean dependent var	403196.6
Sum squared resid	5.91E+11	Durbin-Watson stat	0.048788

Lampiran 5 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: DATAPANEL
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	353.428832	(4,26)	0.0000
Cross-section Chi-square	140.493645	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: TENAGAKERJA?
Method: Panel Least Squares
Date: 06/24/22 Time: 18:32
Sample: 2014 2020
Included observations: 7
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	396517.4	142982.3	2.773192	0.0095
PDRB?	0.002855	0.012165	0.234672	0.8161
UMK?	-0.102371	0.108214	-0.946001	0.3517
INVESTASI?	-0.012829	0.023878	-0.537274	0.5950
PAD?	0.000255	0.000489	0.521389	0.6059
R-squared	0.260579	Mean dependent var		403196.6
Adjusted R-squared	0.161990	S.D. dependent var		153348.9
S.E. of regression	140380.0	Akaike info criterion		26.67366
Sum squared resid	5.91E+11	Schwarz criterion		26.89585
Log likelihood	-461.7890	Hannan-Quinn criter.		26.75036
F-statistic	2.643075	Durbin-Watson stat		0.048788
Prob(F-statistic)	0.053008			

Lampiran 6 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: DATAPANEL
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1413.715327	4	0.0000

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
----------	-------	--------	------------	-------

PDRB?	0.016714	0.002855	0.000022	0.0034
UMK?	-0.061616	-0.102371	0.000856	0.1637
INVESTASI?	-0.000519	-0.012829	0.000004	0.0000
PAD?	0.000081	0.000255	0.000000	0.0439

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TENAGAKERJA?

Method: Panel Least Squares

Date: 06/24/22 Time: 18:33

Sample: 2014 2020

Included observations: 7

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	148759.8	42674.05	3.485955	0.0018
PDRB?	0.016714	0.005051	3.309006	0.0027
UMK?	-0.061616	0.033168	-1.857663	0.0746
INVESTASI?	-0.000519	0.003990	-0.130016	0.8976
PAD?	8.10E-05	0.000111	0.726685	0.4739

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.986647	Mean dependent var	403196.6
Adjusted R-squared	0.982538	S.D. dependent var	153348.9
S.E. of regression	20264.12	Akaike info criterion	22.88813
Sum squared resid	1.07E+10	Schwarz criterion	23.28807
Log likelihood	-391.5422	Hannan-Quinn criter.	23.02619
F-statistic	240.1357	Durbin-Watson stat	1.760326
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7 Perhitungan Elastisitas

Variabel	Koefisien Variabel	Rata-Rata Jumlah Tenaga Kerja	Rata-Rata Independen Variabel	Koefisien Elastisitas	Kategori
PDRB	0.016714	403197	18497323	0.77	Inelastis
UMK	-0.061616	403197	1440254	-0.22	Inelastis
Investasi	-0.000519	403197	510436	-0.00065	Inelastis
PAD	8.10E-05	403197	423177493	0.085	Inelastis

